

**TAHUN 1963 PERGURUAN TINGGI  
MENJAWAB TANTANGAN  
MASALAH PANGAN**



**TAHUN 1963 PERGURUAN TINGGI  
MENJAWAB TANTANGAN  
MASALAH PANGAN**

**DITERBITKAN ATAS KERJASAMA IPB PRESS  
DENGAN PROGRAM PASCASARJANA IPB  
BOGOR  
2002**

Tahun 1963 Perguruan Tinggi Menjawab  
Tantangan Masalah Pangan

ISBN 979 - 493 - 092 - X

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan ke 1 : diterbitkan oleh **Fakultas Pertanian**  
**IPB**, 1992

Cetakan ke 2 : diterbitkan oleh **IPB Press**, 2002

Desain cover : **Luki Ariftia**

Sumber Data **Grafik** pada Cover : dokumen terbitan **Biro Pusat Statistik**

Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini **tanpa izin**  
tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Dalam buku panduan setiap dies IPB selalu tercantum peran IPB sebagai pencetus Bimas. Sejauh mana peran tersebut ingin ditelusuri.

Bagi sebagian anggota sivitas akademika IPB yang berkesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimas pada pertengahan sampai penghujung dekade enam puluhan mengetahui peran perguruan tinggi pada umumnya dan Fakultas Pertanian pada khususnya dalam Bimas. Walaupun demikian apa yang diketahui mungkin bersifat parsial. Apalagi bagi generasi muda yang tidak berpartisipasi secara langsung. Kepada mereka dan masyarakat lainnya perlu diberikan informasi yang akurat.

Fakultas Pertanian sebagai salah satu fakultas tertua di IPB terpenggil untuk mendokumentasikan fakta mengenai Bimas tersebut dan mengkaji perannya pada waktu pra Bimas dan pasca Bimas. Untuk itu Fakultas Pertanian telah menugaskan suatu satuan tugas untuk menyusun tulisan ini.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, tim satgas menemui beberapa kendala seperti tidak lengkap tersedianya informasi tertulis. Untuk melengkapi informasi tersebut, diselenggarakan suatu acara sarasehan. Dalam pelaksanaannya kemudian, sarasehan berkembang menjadi diskusi panel.

Penulisan yang direncanakan ternyata tidak sesederhana perkiraan semula. Namun demikian, kegigihan tim penulis dalam menelusuri informasi dapat menghasilkan tulisan ini.

Perlu dikemukakan bahwa maksud penulisan ini jauh dari unsur-unsur penonjolan diri perorangan, kelompok ataupun institusi. Hendaknya tulisan ini dapat dijadikan suri teladan bagi generasi muda, bahwa transfer teknologi bila

disampaikan dengan tekun dan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik.

Selain itu tulisan ini diharapkan mendorong pelaku-pelaku dalam pencetusan Bimas untuk menuliskan pengalamannya menurut sudut pandang yang lain.

Akhirnya kepada tim penulis dan segenap peserta diskusi panel serta nara sumber disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga tulisan ini dapat terwujud.

Bogor, September 1992

Fakultas Pertanian IPB  
Dekan,

**Dr. Ir. Syafrida Manuwoto**

## **TIM PENYUSUN**

**Penasehat** : **Dr. Ir. Syafrida Manuwoto**  
**Penanggung Jawab** : **Prof. Dr. Ir. H. Kuntjoro**  
**Ketua Pelaksana** : **Dr. Ir. M.A. Chozin, MAgr.**  
**Wakil Ketua** : **Ir. Gunardi, MA.**  
**Sekretaris** : **Ir. Sugiyanta**  
**Anggota** : **Ir. Purwono, MS.**  
**Ir. Munif Ghulamahdi, MS.**  
**Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo**  
**Nara Sumber** : **Prof. Dr. Ir. Soemartono**  
**Prof. Dr. Ir. Sarsidi Sastrosumarjo**  
**Ir. Abas Tjakrawiralaksana**





KATA PENGANTAR .....	i
TIMPENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>SITUASI PANGAN NASIONAL SEBELUM TAHUN</b>	
1963 .....	1
Pada Masa Penjajahan .....	1
Pada Masa Kemerdekaan <b>Tahun</b> 1945-1963 .....	3
<b>MODERNISASI PRODUKSI PADI</b> .....	9
Munculnya <b>Gagasan</b> Modernisasi Produksi Padi .....	9
Produksi Padi Menjadi Issue Politik .....	9
Terobosan Sistem Penyuluhan .....	11
Perguruan <b>Tinggi</b> Siap Menjawab Tantangan .....	13
Pilot Proyek Panca <b>Usaha</b> Lengkap .....	15
Tujuan Penyelenggaraan .....	15
Persiapan .....	16
Pelaksanaan .....	19
Produksi dan Pendapatan .....	21
Pembentukan dan Pendewasaan Koperta ..	23
Perluasan Panca <b>Usaha</b> .....	26
Demonstrasi Massal (Demas) Swa Sembada <b>Bahan Makanan</b> (SSBM).....	27
Tujuan Penyelenggaraan .....	27
<b>Akhir Rintisan</b> dan Munculnya Program Bimbingan Massal (Bimas).....	30
<b>PENGEMBANGAN PROGRAM BIMAS</b> .....	31
<b>Bimas Nasional</b> .....	31
<b>Latar Belakang</b> .....	31
Pengorganisasian Bimas .....	33

Target dan Realisasi .....	33
Penyaluran Sarana Produksi .....	34
Pegembalian Kredit .....	35
Penyuluhan .....	36
Bimas Gotong Royong .....	37
<b>Latar</b> Belakang .....	37
Target <b>dan</b> Realisasi .....	39
Penyaluran Sarana Produksi dan Biaya	
<b>Hidup</b> .....	40
Pengembalian Kredit .....	44
<b>Penyuluhan</b> .....	46
Bimas Nasional yang <b>Disempurnakan</b> .....	49
Pilot Proyek .....	49
Pelaksanaan .....	51
Periode Pemantapan (Intensifikasi <b>Khusus</b> )	52
Perluasan Sistem Bimas pada Berbagai	
Komoditas .....	56
Program Supra <b>Insus</b> .....	58
<b>Latar</b> Belakang .....	58
Pelaksanaan .....	59
PENUTUP .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Penggolongan Petani Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap 1963/1964 Menurut Ketekunan dan Ketepatan dalam Melaksanakan Anjuran-anjuran Berpanca Usaha .....	21
2.	Produksi Padi Rata-rata di Dalam dan di Luar Proyek Desa Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap, Musim Hujan 1963/1964 .....	22
3.	Jumlah Anggota dan Simpanan Koperta di Tiga Desa Pilot Proyek .....	25
4.	Hasil yang Dicapai oleh Demas SSBM Musim Penghujan 1964/1965 .....	29
5.	Hasil yang Dicapai oleh Bimas SSBM Musim Penghujan 1965/1966 .....	31
6.	Kenaikan Hasil Bimas Nasional dari MH 1963/1964 sampai dengan MK 1967 .....	34
7.	Keadaan Sisa Kredit Bimas Nasional sampai dengan April 1969 .....	35
8.	Target Bimas GR (1968/69-1969/70) Menurut Musim Tanam dan Perusahaan .....	38
9.	Nilai Perhitungan Kredit yang Diterima Petani di Enam Desa Bimas CIBA-I untuk Setiap Hektar .....	40
10.	Realisasi Pengembalian Kredit per ha oleh Petani Enam Desa Bimas GR CIBA di Jawa MH 1968/69 ....	45
11.	Intensitas Penyuluhan, Pengenalan Input Baru dan Tingkat Pelaksanaan Panca Usaha di Enam Desa Contoh Bimas GR CIBA-I MH 1968/1969 di Jawa ....	47
12.	Pilihan Petani antar Dua Alternatif : Bimas Umum Pupuk Tidak Dihargakan 1 kg Urea 1 kg Beras di Desa Musim Garap dengan Bimas CIBA (Persentase Petani Contoh) .....	48



## SITUASI PANGAN NASIONAL SEBELUM TAHUN 1963

### **Pada Masa Penjajahan**

Peningkatan produksi padi merupakan masalah bagi Indonesia sejak lama. Konon, pada tahun 1800 pun Gubernur Jenderal Daendels sudah memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk melakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan produksi padi para petani, **antara** lain dengan **memperbaiki** budidayanya. Pada tahun 1874 sebuah panitia beranggotakan pejabat-pejabat Belanda dibentuk dan diberi **tugas** untuk mengajar para petani **dalam** meningkatkan produksi padi **sawah**. Beberapa tahun kemudian Pemerintah menyelenggarakan percobaan dan percontohan budidaya **tanaman** padi. Tahun 1899 percobaan dan percontohan **tersebut** dilakukan di **atas** kebun-kebun percontohan tetap, yang tidak **banyak** jumlahnya. Pada tahun 1900 percobaan dan percontohan dihentikan, karena dinilai tidak berhasil **menggerakkan** para petani untuk mencontohnya. Pada masa itu campur **tangan** Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi **selalu** disalurkan melalui jajaran **Pamong Praja**. Akan tetapi pendekatan **penyuluhan** melalui pamong praja dinilai kurang berhasil. Melchior Treub (Direktur Kebun Raya) berhasil meyakinkan pemerintah Belanda **tentang** perlunya penanganan **secara khusus** masalah pertanian rakyat oleh suatu **badan teknis** tertentu, **maka** didirikanlah Departemen Pertanian (Departement van Landbouw) yang **mulai** bekerja pada **tanggal 1 Januari 1905** di **bawah pimpinan** Treub (Paerels, 1929).

Dalam *Koninklijke* Besluit (Keputusan Kerajaan) 28 Juli 1904 No. 28 (Staatsblad 380) yang memberikan landasan kerja Departemen Pertanian, dinyatakan bahwa untuk memajukan pertanian rakyat diperlukan campur tangan

pemerintah dan pertanian rakyat mendapat prioritas utama dibandingkan bidang-bidang lain. Pengembangan pertanian rakyat secara langsung ditangani oleh seorang Ajun Inspektur Pertanian.

Berbagai penelitian yang mendorong kemajuan pertanian rakyat terutama diselenggarakan di Kebun Raya, Kebun Percobaan Padi dan Palawija serta Kebun Tanaman Perdagangan. Obyek penelitian meliputi berbagai jenis padi dan kacang tanah serta berbagai percobaan tentang pengaruh penyawahan terhadap tanah lapisan atas. Pada masa itu masalah pengairan telah mendapat perhatian dan telah dilakukan penelitian tentang proses pelapukan batu-batuan. Selain itu penelitian mengenai pemberantasan hama penyakit banyak dilakukan dan hasilnya disebarluaskan.

Upaya dalam bidang pendidikan ditandai dengan didirikannya Sekolah Pertanian Bogor dan diselenggarakannya berbagai kursus oleh Kebun Tanaman Perdagangan dan Balai Penelitian Tanaman padi serta dibukanya kebun-kebun Demonstrasi.

Pada tahun 1908 Pemerintah mengangkat Penasehat-penasehat Pertanian. Pada tahun 1910 Departemen Pertanian di bawah pimpinan Lovink membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian (*Landbouw Voorlichtings Dienst*), sesudah itu dimulailah upaya memajukan pertanian rakyat dengan penyuluhan pertanian. Penyuluhan kepada para petani, termasuk dalam hal peningkatan produksi padi, dilaksanakan dengan strategi "tetesan minyak" (*olie vlek systeem*). Dengan strategi ini, penyebaran gagasan, pengetahuan dan teknologi kepada para petani pada umumnya dilakukan melalui para pemimpin masyarakat dengan dukungan percobaan dan percontohan budidaya tanaman, kursus tani, serta pembentukan dan pembinaan kelompok tani, yang sasaran pertamanya adalah lapisan elite masyarakat desa.

Penyuluhan pertanian pada masa penjajahan Belanda telah memperkenalkan beberapa varietas padi baru (padi Cina dan Skrivimankoti) disamping varietas-varietas baru berbagai komoditi lain, serta perbaikan cara-cara bercocoktanamnya. Meskipun kemajuan pertanian dapat dinilai berjalan lambat, tetapi memadai dalam memenuhi kebutuhan saat itu.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), kebutuhan untuk meningkatkan produksi padi dan komoditas lainnya menjadi sangat mendesak, terutama untuk mendukung bala tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Meskipun demikian, usaha peningkatan produksi padi dan komoditas lainnya melalui penyuluhan pertanian tidak terlaksana dengan baik. Yang lebih menonjol adalah gejala kekurangan makan di kalangan rakyat, sebagai akibat pengerahan hasil pertanian bagi kepentingan perang.

### **Pada Masa Kemerdekaan Tahun 1945 - 1963**

Pada masa permulaan Indonesia merdeka, upaya untuk memajukan pertanian dirancang dengan "Plan Kasimo". Karena berlangsungnya revolusi fisik pada masa itu, program-program baru terlaksana mulai tahun 1950. Plan Kasimo mencakup produksi benih unggul, perbaikan dan perluasan pengairan pedesaan, peningkatan penggunaan pupuk dan pemberantasan hama, peningkatan pengendalian tanah larut, intensifikasi pemakaian tanah kering, dan peningkatan pendidikan masyarakat desa. Sementara itu kebutuhan untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama beras, menjadi makin terasa, karena semakin stabilnya kehidupan dan makin bertambahnya penduduk.

Dalam hal penyuluhan pertanian ada terobosan, yakni didirikannya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), suatu tempat dengan bangunan untuk pertemuan-pertemuan dan lahan (1 - 2 ha) untuk demonstrasi usahatani dan industri kecil. Pemimpin balai ini dipegang oleh petugas

Jawatan Pertanian Rakyat dan balai ini bersifat netral dari kepentingan politis. Menurut rencana akan didirikan satu BPMD untuk setiap kecamatan. Karena keterbatasan dana, rencana itu baru terlaksana sebagian.

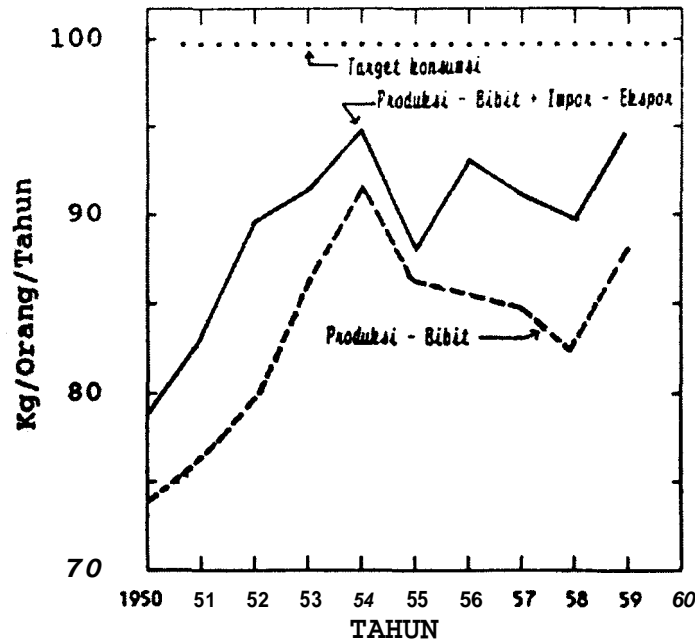
Perguruan tinggi, khususnya Fakultas Pertanian IPB (pada saat itu di bawah UI) telah mendapat tantangan untuk merintis upaya memenuhi kebutuhan pangan, berawal dari pidato Presiden Soekarno pada saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor, 27 April 1952, yang berjudul “Soal Hidup atau Mati”.

Sejak tahun 1950 hingga 1959 kondisi konsumsi pangan dinilai sangat kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan kalori (1900 kalori/hari termasuk 47,15 gram protein). Apabila dihitung dalam nilai beras, kebutuhan tersebut dapat tercukupi dari 100 kg beras dan 60 kg pangan nonberas (jagung, ubi kayu atau ubi jalar) perjiwa pertahun. Walaupun impor beras telah dilakukan dan makin meningkat pada tahun-tahun 1956-1959, ternyata persediaan beras masih belum mencapai kebutuhan (konsumsi) standar perkapita pertahun (Gambar 1).

Kebutuhan akan beras yang makin meningkat, dan tingginya laju pertambahan penduduk mendesak Pemerintah untuk memperhatikan peningkatan produksi beras secara istimewa. Pemerintah mengeluarkan Rencana Tiga Tahun Produksi Padi (1959 - 1961) yang mempunyai target swasembada beras pada akhir tahun 1961. Untuk mencapai target tersebut, dilancarkanlah suatu gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan sarana produksi. Ketersediaan sarana produksi padi waktu itu terbatas karena kondisi ekonomi yang buruk.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada umumnya, Pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE), dibawah komando Presiden. Untuk memobilisasi gerakan masyarakat dalam perbaikan pertanian, khususnya





Gambar 1. Target Konsumsi dan Produksi Beras untuk Konsumsi Perkapita Tahunan (Departemen Pertanian, 1960)

peningkatan produksi padi, dibentuk Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM). KOGM tingkat pusat dipimpin oleh Menteri Pertanian. Sedangkan di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dipimpin oleh kepala daerah/wilayah masing-masing. Sementara itu di desa-desa diangkat Pamong Tani Desa (PTD), yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan swa sembada beras.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan KOTOE maupun KOGM tidak terlepas dari pengaruh politik Demokrasi Terpimpin, sehingga peranan ABRI sangat mewarnai upaya menggerakkan masyarakat di bidang pertanian. Pada waktu itu peranan teknokrat dalam politik belum banyak berarti.

Untuk mendukung penyediaan sarana produksi, Pemerintah membentuk Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT) dengan dua anak

perusahaan yaitu Padi Centra dan Mekatani. Padi Centra bertugas untuk mengadakan, menyalurkan, dan menyediakan sarana produksi bagi para petani, terutama pupuk buatan, insektisida, dan bibit unggul padi. Mekatani bertugas membuka lahan baru dengan alat-alat berat untuk ditanami padi lahan kering, terutama di luar Jawa. Padi Centra kemudian menjadi Padi Sentra, sekarang bernama PN Pertani.

Penyuluhan dilaksanakan dengan kampanye besar-besaran bukan lagi dengan "*olie-vlek*" sistem. Dinas Pertanian Rakyat adalah penanggung jawab kegiatan, dan didukung oleh aparat pemerintahan lainnya terutama Pamong Praja, yang merupakan unsur teras KOGM di berbagai tingkatan. Berbagai metode penyuluhan pertanian digunakan untuk mendukung rencana ini, termasuk ceramah-ceramah, pameran, dan pawai-pawai.

Pada awal kampanye ini Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, atas permintaan KOGM, masing-masing menugaskan sekitar 30 orang mahasiswa akhir tingkat kedua atau ketiga, selama 3 minggu, bergabung dengan pejabat-pejabat dari berbagai Departemen di Jakarta untuk melakukan verifikasi persiapan pelaksanaan program produksi padi di daerah-daerah. Setiap tim gabungan interdepartemental yang terdiri dari 4 - 5 orang, ditugaskan di suatu kabupaten yang merupakan sentra produksi padi. Tim ini melakukan peninjauan ke kantor-kantor instansi pelaksana program, ke gudang-gudang penyedia sarana produksi, ke desa-desa dan sawah, untuk mendapatkan laporan dan melihat sendiri bagaimana program produksi padi dipersiapkan dan dilaksanakan.

Di Jawa Barat dibentuk kelompok-kelompok yang anggota-anggotanya adalah petani yang menggarap sawah "*seamparan samak*" (arti harfiahnya seamparan tikar, menunjukkan sekelompok lahan sawah yang berdekatan letaknya). Petani seamparan bernaung dalam OPSSB

(Organisasi Pelaksana Swa Sembada Beras). Organisasi ini merupakan kelompok tani pertama yang anggotanya bersifat “massal”, dan tidak “elitis”. Struktur organisasi OPSSB, terdiri dari *Sesepuh*, di bawah kepemimpinannya ada tiga orang **Kokolot**, masing-masing memimpin 10 (sepuluh) orang petani yang menggarap sawah di sekitar sawah garapannya. Kelompok ini diharapkan berperan sebagai “brigade kerja”, terutama untuk menggerakkan anggota-anggotanya menggunakan teknologi baru **Panca Usaha** (pengairan, bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dan perbaikan cara bercocoktanam). Pembentukan dan pergerakan OPSSB di Jawa Barat mengalami banyak kesulitan, antara lain masalah kepemimpinan. Pemimpin yang diharapkan ada di **hamparan sawah** ternyata tidak dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan petani menerapkan panca usaha.

Atas permintaan KOGM, Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor turut serta dalam gerakan penyuluhan di Jawa Barat. Selama 1 atau 2 bulan sekitar 60 orang mahasiswa tingkat ketiga atau keempat ditugaskan di kecamatan-kecamatan sentra produksi padi, untuk **mendampingi** para penyuluh pertanian dalam membina OPSSB dan melaksanakan kegiatan penyuluhan lainnya di desa-desa. Bagi mahasiswa yang ditugaskan menjadi pelaksana maupun staf pengajar yang mengelola mereka, kesempatan ini memberikan pengalaman lapangan yang berharga tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi dan penyuluhannya. Pengalaman tersebut, pada tahun-tahun berikutnya terulang kembali untuk menjawab tantangan masalah pangan.

Upaya untuk mendorong para petani menggunakan teknologi baru yaitu insektisida, pupuk anorganik dan bibit unggul, yang didorong dengan penyediaan kredit oleh Padi Sentra, ternyata tidak mencapai hasil yang diharapkan baik di Jawa Barat maupun di seluruh sentra produksi padi.

Penyuluhan pertanian tidak mampu meyakinkan petani dalam waktu singkat untuk menggunakan teknologi itu. Salah satu pelajaran yang dapat ditarik dari sini adalah bahwa "gerakan" dengan pendekatan "komando" kurang berhasil. Disamping itu dalam pelaksanaannya masing-masing dirasakan kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas.

# MODERNISASI PRODUKSI PADI

## Munculnya Gagasan Modernisasi Produksi Padi

### *Produksi Padi Menjadi Issue Politik*

Setelah dilancarkannya Rencana Tiga Tahun Produksi Padi (1959-1961), yang ternyata tidak berhasil mencapai swa sembada beras pada tahun 1961, terjadilah suasana krisis akan konsep pembangunan pertanian, khususnya peningkatan produksi padi untuk mencukupi kebutuhan beras, termasuk konsep penyuluhannya. Pada bulan Mei 1963 instruksi Menteri Pertanian kepada Jawatan Pertanian Rakyat diterbitkan. Intruksi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki sistem dan cara penyuluhan pertanian, dan membangun organisasi penyuluhan pertanian yang akhirnya berbentuk piramida besar dengan dasar yang lebar dan luas di tingkat desa (Kretosastro, 1967).

Pada waktu itu Indonesia sedang mengalami krisis politik, sebagai kelanjutan dari ketidakberhasilan Konstituante merumuskan Undang-undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia Serikat, yang berlanjut dengan diumumkannya Dekrit Presiden tahun 1959, menyebabkan sebagian besar kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. Tentangan antara lain muncul dari para cendekiawan, yang membandingkan sistem pemerintahan Indonesia waktu itu dengan sistem pemerintahan negara-negara lain, misalnya yang berasas "trias politica".

Dalam waktu yang bersamaan Indonesia juga mengalami krisis ekonomi. Perjuangan merebut kembali Irian Barat (sekarang : Irian Jaya), telah berlangsung sangat hebat dan lama. Perjuangan itu memakan banyak biaya dengan hasil kembalinya Irian Jaya menjadi wilayah Republik Indonesia pada tahun 1962. Pada tahun 1964 Indonesia menyelenggara-

kan Pekan Olah Raga Asia (Asian Games), termasuk di dalamnya membangun stadion dan kompleks olah raga, yang memakan banyak biaya. Disamping itu Konfrontasi dengan Malaysia yang dimulai bulan Desember 1962 memakan banyak pengorbanan, antara lain terhentinya bantuan luar negeri bagi Indonesia dari negara-negara Barat. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, Presiden mencetuskan ekonomi terpimpin. Gagasan tersebut mendapat tentangan dari golongan yang berpendapat bahwa perekonomian sebaiknya disusun atas dasar prinsip-prinsip "ekonomi pasar". Untuk melawan pendapat-pendapat yang menentangnya, baik dalam masalah politik maupun masalah perekonomian, Presiden Soekarno melancarkan cemoohan "text book thinking", yang ditujukan kepada para cendekiawan.

Dengan adanya krisis pembangunan pertanian dalam suasana krisis politik dan krisis ekonomi, organisasi massa tani dan organisasi lain yang bernaung di bawah partai-partai politik berlomba-lomba merebut simpati masyarakat, dengan memperlihatkan karya mereka dalam memperjuangkan nasib para petani. Kalangan kaum cendekiawan, khususnya yang bekerja di perguruan tinggi, berkehendak kuat untuk menyumbangkan karya guna mengatasi berbagai krisis tantangan tersebut (Reiffel, 1969).

Ir Djatijanto Kretosastro M.Sc., seorang staf pengajar Bagian Tanaman Setahun, Departemen Agronomi Fakultas Pertanian UI (pada bulan September 1963 menjelma menjadi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) mencoba melakukan analisis tentang kendala usaha peningkatan produksi padi yang berpendapat bahwa dengan penerapan Panca Usaha kenaikan produksi menjadi berlipat. Umpamanya saja, produksi meningkat 70 persen dengan pemberantasan hama dan penyakit, sedangkan dengan pemupukan yang tepat dalam percobaan lainnya produksi naik 100 - 200 persen. Belum lagi faktor input lainnya.



Hasil analisis dan diskusi Ir Djatijanto Kretosastro M.Sc. dan kawan-kawan di Fakultas Pertanian melahirkan pemikiran agar pelaksanaan bimbingan kepada petani diselenggarakan secara intensif. Bimbingan tersebut dilakukan atas sejumlah petani dalam jumlah tertentu di suatu hamparan luas sawah dengan luas tertentu, sehingga suatu penyuluhan yang lebih sistematis dan efektif dapat dilakukan. Selanjutnya dari jumlah petani tertentu dalam hamparan luas terbatas tersebut diharapkan perluasan intensifikasi dan kesadaran berpanca usaha serta berkoperasi menyebar secara lebih luas dan cepat (Kretosastro, 1967).

Pemikiran tersebut di atas merupakan terobosan kendala peningkatan produksi padi. Penyuluhan yang semula dilakukan dengan demonstrasi di petak sawah yang sangat terbatas luasnya, diubah dengan demonstrasi pada suatu hamparan sawah yang cukup luas, agar memberikan kesan yang lebih "mengagumkan" kepada para petani, sekaligus mendorong sejumlah petani mempraktekkan sendiri panca usaha dan benar-benar merasakan keun-tungannya. Disamping itu, dengan mengambil kompleks sawah yang cukup luas, diharapkan para petani merintis kerjasama untuk membentuk koperasi, yang waktu itu secara nasional disebut Koperta (Koperasi Produksi Pertanian).

Memahami situasi bahwa PTD (Pamong Tani Desa) yang sudah dibentuk di desa-desa tidak mungkin membimbing petani-petani sedesa secara intensif seorang diri, maka perlu segera dibina kader-kader pertanian. Mahasiswa Fakultas Pertanian merupakan potensi untuk mengatasi masalah pembimbingan kader pertanian.

Bila disoroti asal mahasiswa Fakultas Pertanian pada tahun enam puluhan kebanyakan berasal dari kota. Bila ada yang berasal dari desa mereka adalah anak-anak lapisan elite, misalnya Kepala Desa. Kepada mahasiswa Fakultas Pertanian diberi tugas praktek lapang sebagaimana tercantum dalam kurikulum. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk



membentuk mahasiswa supaya berorientasi kepada solusi masalah-masalah nyata yang dihadapi petani di pedesaan. Kepada mahasiswa ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan kepada petani-petani secara intensif, membentuk kader-kader pertanian, dan mendampingi para PTD.

Pada tanggal 13 - 20 Juli 1963 di Pasar Minggu (Jakarta) diselenggarakan Mukhtar Kerja Ikatan Sarjana Pertanian dan Kehutanan (ISPK). Dalam mukhtar tersebut Menteri Pertanian menyatakan bahwa cara-cara penyuluhan pertanian dan implementasinya, baik alat maupun orang-orang yang menjadi pelaksananya di desa-desa, sudah tidak sesuai lagi dengan irama kecepatan revolusi. Oleh karena itu disarankan agar secepatnya ditemukan cara-cara penyuluhan yang benar-benar efektif bagi peningkatan produksi. Sebagai seorang peserta, Ir. Djatijanto Kretosastro M.Sc. mengemukakan gagasannya pada prasaran yang dibacakan dalam mukhtar kerja tersebut, tetapi prasaran tersebut tidak mendapat perhatian yang berarti dalam pembahasannya (Kretosastro, 1967).

### ***Perguruan Tinggi Siap Menjawab Tantangan***

Pada masa itu, perkembangan-perkembangan sedang terjadi di kalangan perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja, berkat pengalaman beliau sebelumnya selama menjadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, telah mencanangkan dilaksanakannya Tridarma Perguruan Tinggi di perguruan-perguruan tinggi, termasuk darma pengabdian masyarakat disamping darma pendidikan dan darma penelitian. Di Departemen PTIP sendiri dibentuk suatu unit, Lembaga Koordinasi Pengabdian Masyarakat, yang bertugas membantu perguruan-perguruan tinggi dalam merealisasikan darma pengabdian masyarakat, termasuk membantu penyediaan dananya.

Perkembangan di kalangan perguruan tinggi ini telah mendorong Ir. Djatijanto Kretosastro M.Sc. dan kawan-kawan membicarakan gagasan yang telah ditanggapi dalam muktamar kerja ISPK dengan Kepala LKPM Departemen PTIP, Prof. Dr. Ir. Soetardi Mangoendojo. Kepala LKPM menerima baik gagasan tersebut, bahkan mendorong supaya diajukan usul tertulis.

Usul tertulis kepada Lembaga Koordinasi Pengabdian Masyarakat, diajukan pada bulan Agustus 1963 untuk merealisasikan gagasan pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam bentuk "*action research*" dengan nama Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap, yang akan dilaksanakan di kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usul tersebut disetujui oleh LKPM Departemen PTIP dengan bantuan hibah sebesar 1,3 juta rupiah. Bantuan itu oleh proyek akan dipergunakan terutama untuk membiayai proyek, antara lain membeli sarana produksi bagi para petani, yang diharapkan dikembalikan dalam bentuk "in natura" berupa padi, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kelanjutan proyek.

Disebut sebagai pilot proyek, karena diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi perintis yang kemudian diperluas di daerah-daerah lain. Istilah "**lengkap**" tidak dimaksudkan untuk menggambarkan adanya kelima unsur dari panca usaha, atau lengkapnya perlakuan dalam setiap unsur panca usaha, tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kegiatannya menyeluruh, disamping penerapan teknologi juga pelayanan sarana produksi dan penyuluhan.

Kabupaten Karawang dipilih karena merupakan pusat produksi padi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, lebih-lebih dengan mulai berfungsinya sistem pengairan Jatiluhur ketika itu. Disamping itu, disadari bahwa pilot proyek harus aman dari gangguan politik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang waktu itu, Ir. D. Kusnadi, adalah alumnus Fakultas Pertanian IPB yang diketahui akan mendukung pelaksanaan pilot proyek tersebut.

Pada tanggal 2-7 September 1963 Rapat Kerja Inspektur Dinas Pertanian Rakyat seluruh Indonesia di Jakarta mengambil beberapa keputusan, antara lain :

- a. Bahwa intensifikasi pertanian akan dilaksanakan secara selektif dengan mendahulukan daerah yang mempunyai respons yang lebih tinggi terhadap intensifikasi tersebut, serta resiko-resiko kegagalannya kecil;
- b. Secara aktif akan distimulir pembentukan Koperasi Produksi Pertanian

Kedua keputusan itu sangat mendukung pelaksanaan pilot proyek Panca Usaha Lengkap.

### **Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap**

#### ***Tujuan Penyelenggaraan***

Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap adalah suatu cara intensifikasi massal yang bertujuan untuk mempercepat timbulnya kesadaran, dan dengan demikian meningkatkan aktivitas petani produsen itu. Pilot proyek juga mencakup program di bidang sosial-ekonomi dan program pendidikan mahasiswa (Kretosastro, 1967)

Program di bidang sosial-ekonomi mempunyai tujuan untuk :

- (a) Merintis pendirian Koperasi Produksi Pertanian (Koperta), atau mendewasakan Koperta tersebut bila sudah ada, dan memperlancar administrasi dan organisasinya;
- (b) Berusaha meneliti "cost of production" dan "cost of living" dari petani-petani, untuk menentukan kredit yang diperlukan bagi para petani.

Dan di bidang pendidikan, pilot proyek tersebut berusaha untuk :

- (a) Memberi pendidikan praktek kepada para mahasiswa dalam aspek-aspek pertanian, baik teknis, sosial, maupun ekonomis, mengenai kehidupan para petani. Hal ini sangat penting sebab kebanyakan mahasiswa Fakultas Pertanian tidak datang dari kalangan keluarga petani sendiri, tetapi datang dari keluarga pegawai negeri atau swasta. Pemahaman persoalan petani selama 7 bulan merupakan "*conditio sine qua non*" bagi seorang sarjana pertanian, sehingga diharapkan agar pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pegangan mahasiswa untuk mengabdikan pada masyarakat petani dan dengan demikian benar-benar mengemban amanat penderitaan rakyat.
- (b) Untuk mengabdikan dan mengamalkan ilmu langsung kepada masyarakat, khususnya para petani itu sendiri, sesuai dengan pengertian ilmu untuk amal yang disampaikan dengan cara ilmiah (ilmu amaliah).

### ***Persiapan***

Persiapan-persiapan pilot proyek dilakukan dalam waktu singkat. Untuk melaksanakan pilot proyek tersebut, di Fakultas Pertanian IPB dibentuk sebuah tim, dengan Ketuaanya Ir. Djatijanto Kretosastro, M.Sc., Sekretaris Ir. Sukmana Satjanata, dan anggota-anggotanya adalah Ir. Sarsidi Sastrosumarjo, Ir. Soemartono Sosromartono, M.Sc., Ir. Kang Biau Tjwan, M.Sc., Ir. I Gusti Bagus Teken, M.Sc. dan Abas Tjakrawiralaksana.

Pembicaraan Tim Fakultas Pertanian IPB dengan Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Karawang, Ir. D. Kusnadi merupakan awal persiapan di lapangan. Kepala Dinas Kabupaten Karawang kemudian menghubungkan tim Fakultas Pertanian IPB dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karawang, Kolonel M. Husni. Bupati Karawang menerima rencana pelaksanaan pilot proyek dengan antusias.

Pada waktu yang bersamaan di Kabupaten Karawang sedang dilaksanakan proyek-proyek lain yang dibantu pembiayaannya oleh LKPM, yaitu Pembinaan Kesehatan oleh Dr. Herman Soesilo dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Penelitian tentang Marketing Padi oleh Ir. Rukasah Adiratna, M.Sc., dan Penelitian tentang Perkreditan oleh Ir. Sudjanadi, M.Sc., keduanya dari Fakultas Pertanian IPB.

Tim Fakultas Pertanian IPB mengharapkan agar pilot proyek dapat dilaksanakan di beberapa desa yang berbeda-beda kondisinya. Atas saran Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Karawang, pilot proyek tersebut direncanakan untuk dilaksanakan di desa Tanjungpura, Tunggakjati dan Karawangkulon.

Tim pilot proyek kemudian mengikutsertakan para mahasiswa tingkat terakhir untuk menjadi pelaksana lapangan. Mahasiswa yang berpartisipasi pada umumnya mengaitkan kegiatan pilot proyek tersebut dengan tugas akhir studi mereka. Ada dua belas orang mahasiswa dari berbagai Jurusan yang berpartisipasi dalam pilot proyek tersebut, beberapa di antaranya adalah Moch. Kasim, Ariana Abdullah, Achmad Sudarma, Suparman, Achmad Darsana, Rasnata, Moch. Ismachin, Zalidar Yacub dan Wijang Herry Sisworo. Para mahasiswa ini mendapatkan latihan khusus sebelum diberangkatkan ke lapangan.

Kegiatan-kegiatan lapangan pilot proyek untuk musim hujan 1963/1964 dimulai pada tanggal 15 September 1963. Dengan kerjasama berbagai dinas dan instansi yang ada hubungannya dengan pembangunan pertanian dilaksanakanlah Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap di tiga desa, yaitu Tanjungpura, Tunggakjati dan Karawangkulon. Ketiga desa itu mempunyai topografi yang rata, jenis tanahnya alluvial, dan pengairan teknis, yang berasal dari satu sumber dan golongan pengairan yang sama, yakni golongan II.

Dibandingkan dengan kedua desa lainnya, Tanjungpura merupakan desa kota. Kebanyakan petani mempunyai mata pencaharian di luar pertanian, seperti buruh industri, penarik becak dan sebagainya. Karena itu penerapan panca usaha adalah yang paling jelek di antara ketiga desa pilot proyek. Pada keadaan tersebut, produksi sawah sebelum proyek adalah 27-63 ku/ha padi kering panen, menurut ubinan Kantor Pajak Bumi, Jawatan Pertanian Rakyat dan desa. Di desa ini proyek dilaksanakan pada 26,1 ha sawah, dengan 20 orang petani pemilik - penggarap dan 21 petani penggarap - bukan - pemilik.

Desa Tunggakjati letaknya kurang lebih 2 km dari pusat kota Karawang, tetapi dilewati jalan besar beraspal. Di desa tersebut rakyat sudah banyak yang mengetahui panca usaha berkat adanya perlombaan-perlombaan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dan adanya kebun bibit desa yang dikelola oleh Jawatan Pertanian. Di antara ketiga desa proyek, penerapan panca usaha di Desa Tunggakjati dinilai paling baik oleh Jawatan Pertanian rakyat dan desa. Daya produksi sawah sebelum proyek adalah 35 - 37 ku/ha kering panen. Di desa ini pilot proyek meliputi 50,6 ha sawah dan melibatkan 48 orang petani pemilik-penggarap serta 30 petani penggarap - bukan - pemilik.

Desa Karawangkulon terletak paling jauh dari kota dibandingkan dengan kedua desa yang lain, dan hanya dihubungkan dengan jalan desa ke kota yang sangat sulit ditempuh oleh kendaraan bermotor roda empat. Daya produksi sawah 32-46 ku/ha. Di sini ada 20,5 ha sawah yang dipergunakan untuk melaksanakan proyek, yang melibatkan 37 orang petani pemilik-penggarap dan 6 orang penggarap - bukan - pemilik.

Di desa-desa tersebut, para Kepala Desa menentukan kompleks sawah mana yang dipergunakan sebagai lokasi pilot proyek. Luasan kompleks 25 - 50 ha diperhitungkan memadai untuk sesuatu unit, yang dianalogikan dengan suatu kelas di sekolah.

Yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh Tim Pilot Proyek adalah bahwa petani-petani yang menggarap suatu kompleks sawah ternyata tempat tinggalnya terpencar-pencar. Hal ini sangat menyulitkan pelaksanaan penyuluhan. Oleh karena itu bimbingan kepada petani dilakukan dengan pendekatan perseorangan. Meskipun demikian, pembentukan Koperta, atau pendewasaannya di lokasi-lokasi yang sudah mempunyai Koperta, tetap merupakan salah satu tujuan pilot proyek.

### ***Pelaksanaan***

Kondisi di lapangan pada waktu itu sulit dibandingkan dengan kondisi Karawang sekarang. Petani yang sedang ada di sawah, apabila melihat orang yang asing bagi mereka, lalu meninggalkan sawah dan kembali ke rumah. Agar menjadi dekat dengan petani para mahasiswa setiap sore melakukan ***anjang sono*** dan mengobrol di rumah petani. Menyatu dengan petani merupakan bekal yang telah dipesankan kepada mahasiswa. Setelah mahasiswa mulai diterima di lingkungan petani, mahasiswa mulai dapat mengajak petani-petani ke sawah dan menerapkan teknologi yang diintroduksikan oleh mahasiswa. Agar dapat meyakinkan petani untuk menerapkan panca usaha, para mahasiswa tidak tinggal diam di pematang sawah, sambil memerintah serta memberi petunjuk, tetapi harus turun tangan, melaksanakan pekerjaan bersama-sama petani. Inilah kunci sukses para mahasiswa.

Agar petani dapat menggunakan sarana produksi sebagaimana yang dianjurkan, mereka memperoleh bibit, pupuk dan insektisida sebagai pinjaman. Pinjaman tersebut dikembalikan dalam bentuk padi sesudah panen, sesuai dengan harga sarana produksi yang telah mereka terima. Meskipun demikian, pada masa pengembalian sikap proyek sangat lunak. Bila petani mengembalikan, pengembalian

tersebut diterima untuk dipergunakan bagi kelanjutan proyek, tetapi petani yang tidak mengembalikan juga tidak ditagih. Dengan kemudahan semacam inipun ternyata pada awalnya pilot proyek tidak mendapat sambutan di kalangan masyarakat di desa-desa. Ilustrasinya adalah sebagai berikut (Kretosastro, 1967):

*"Sehari sebelum diadakan distribusi benih unggul yang diberikan dalam bentuk kredit oleh Pembimbing, diadakan pemutaran film serta musyawarah dengan para petani, di mana semuanya menerima dan "sumuhun" akan bertanam benih unggul nasional yang dianjurkan itu.*

*Semua bersepakat bahwa mereka akan datang mengambilnya keesokan harinya di rumah Lurah mulai jam 6.00 pagi. Sudah menjadi kesepakatan bersama setelah musyawarah 2 sampai 3 kali untuk diberikan benih unggul nasional sebagai kredit yang harus dikembalikan pada akhir panen, juga dengan jenis dan jumlah yang sama.*

*Setelah para Pembimbing esoknya pagi-pagi siap, di Tanjungpura hanya ada 6 orang dari sebanyak 41 orang petani yang datang mengambil benih. Ini berarti hanya 14,5 persen dari jumlah petani yang memenuhi janjinya. Sehingga terpaksa para petugas membagi-bagikan benih tadi ke rumah para petani dan mengumpulkan sekali lagi serta memberinya penerangan sebaik-baiknya kepada mereka agar mau menanam benih unggul nasional".*

Hambatan lain yang dijumpai pada awal penyelenggaraan pilot proyek adalah paceklik disebabkan kekeringan dan serangan hama tikus. Karena itu yang pertama kali dikerjakan Pembimbing (mahasiswa) adalah pembasmian hama tikus tersebut dengan "gropyokan" dan perbaikan tanggul.

Kesulitan demi kesulitan dapat diatasi, berkat kesabaran dan ketekunan para Pembimbing, hal ini menggugah kesadaran para petani. Tujuan pilot proyek mulai terwujud. Petani telah melaksanakan panca usaha lengkap, seperti memanfaatkan air dengan baik, menanam benih unggul



nasional, menerapkan cara bercocok tanam (tandur jajar, pemakaian lalandak, dan sebagainya) yang dianjurkan, dan melakukan pengendalian hama serta penyakit tanaman. Walaupun demikian tingkat intensitas penerapan panca usaha berbeda-beda antar petani dan antar lokasi.

Suatu penilaian telah mengkatagorisasikan petani menjadi : Golongan A, yaitu petani-petani yang paling tekun dan paling loyal mengikuti petunjuk-petunjuk dari Pembimbing; Golongan B seperti golongan A, tetapi dalam intensitas yang lebih rendah; dan Golongan C, seperti golongan B dengan intensitas yang paling rendah. Hasil penilaian tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penggolongan Petani Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap 1963/1964 Menurut Ketekunan dan Ketepatan dalam Melaksanakan Anjuran-anjuran Berpanca Usaha.

Desa	Jumlah Petani	Persentase Tiap Golongan		
		A	B	C
Tunggakjati	78	37,5	12,5	50,0
Karawangkulon	43	84,4	8,8	6,8
Tanjungpura	41	0	50,0	50,0

Sumber : Kretosastro (1967).

### ***Produksi dan Pendapatan***

Dalam kondisi yang demikian ini, Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap ternyata dapat mencatat produksi padi yang tidak mengecewakan pada musim hujan 1963/1964 (dipanen pada bulan April dan Mei 1964), seperti tercantum pada Tabel 2 . Analisis kasus demi kasus menunjukkan kenaikan produksi antara 40 sampai 145 persen.

Tabel 2. Produksi Padi Rata-rata di Dalam dan di Luar Proyek Desa Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap, Musim Hujan 1963/1964.

Desa	Luas Proyek (ha)	Produksi Rata-rata	
		Proyek (kw/ha)	Luar Proyek (kw/ha)
Tunggakjati	50,6	62,5	25,0
Karawangkulon	20,5	68,9	24,4
Tanjungpura	26,1	62,2	43,0

Sumber : Kretosastro (1967).

Analisis usahatani petak-petak sawah 64 orang sample petani Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap menunjukkan data sebagai berikut (Tekendalam Kretosastro, 1967):

- a. Taksiran hasil rata-rata perhektar padi kering desa (termasuk upah panen yang diberikan dalam bentuk padi, bawon) ialah 52,9 Kuintal.
- b. Taksiran upah panen, kira-kira 21,5 persen dari seluruh hasil.
- c. Taksiran harga padi kering desa per kuintal di pasaran bebas setempat Rp. 6.653,-
- d. Taksiran nilai hasil per hektar, termasuk bawon ialah Rp. 351.900,-
- e. Biaya produksi per hektar adalah sebagai berikut :
  1. Biaya nyata
    - 1.1. Biaya pemeliharaan alat-alat dan pembelian alat yang habis semusim Rp. 170,-
    - 1.2. Pajak Rp. 146,-
    - 1.3. Tenaga kerja yang diupah Rp. 27.835,-
    - 1.4. Bibit Rp. 3.495,-
    - 1.5. Pupuk Rp. 3.483,-
    - 1.6. Insektisida Rp. 1.101,-
    - Jumlah Rp. 36.230,-
  2. Nilai bawon Rp. 75.946,-
  3. Penyusutan alat-alat Rp. 1.229,-
  - Jumlah biaya produksi Rp. 113.405,-
- f. Balas jasa per hektar termasuk untuk tanah, kerja keluarga dan pengelolaan (d-e) Rp. 238.539,-

Dengan menggunakan cara yang sama, dapat dilakukan analisis usahatani petak-petak sawah di luar Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap sebagai berikut :

- a. Taksiran hasil rata-rata perhektar padi kering desa (termasuk upah panen yang diberikan dalam bentuk padi, bawon) ialah 32,0 kuintal.
- b. Taksiran upah panen, kira-kira 21,5 persen dari seluruh hasil, 6,88 kuintal.
- c. Taksiran harga padi kering desa per kuintal di pasaran bebas setempat Rp. 6.653,-
- d. Taksiran nilai hasil per hektar, termasuk bawon ialah Rp. 212.896,-
- e. Biaya produksi per hektar adalah sebagai berikut :
  1. Biaya nyata
    - 1.1. Biaya pemeliharaan alat-alat dan pembelian alat yang habis semusim Rp. 170,-
    - 1.2. Pajak Rp. 146,-
    - 1.3. Tenaga kerja yang diupah Rp. 8.335,-
    - 1.4. Bibit Rp. 8.495,-
    - Jumlah Rp. 17.146,-
  2. Nilai bawon Rp. 45.772,-
  3. Penyusutan alat-alat Rp. 1.229,-
  - Jumlah biaya produksi Rp. 81.293,-
- f. Balas jasa per hektar termasuk untuk tanah, kerja keluarga dan pengelolaan (d-e) Rp. 131.603,-

Dari kedua analisis tersebut dapat dihitung bahwa setiap hektar petak-petak sawah peserta Pilot Panca Usaha Lengkap mendapat tambahan balas jasa rata-rata sebesar Rp. 106.936,-

### ***Pembentukan dan Pendewasaan Koperta***

Menyangkut tujuan pembentukan atau pendewasaan Koperta, dapat disebutkan bahwa menjelang dilaksanakannya pilot proyek, di ketiga desa pilot proyek sudah ada koperasi

yang disebut (istilahnya sama untuk seluruh Jawa Barat) Koperasi Penghasil Padi (KPP). Menurut ketentuan anggota KPP adalah petani pemilik tanah, pemaro, buruh tani dan mereka yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian. Salah satu usaha KPP yang utama pada masa itu di daerah Karawang adalah Gotong Royong Pembelian Padi (GRPP) Pemerintah. Karena berbagai kelemahan pengelolaan, baik GRPP maupun usaha-usaha KPP yang lain, tidak menunjukkan keberhasilan.

Para mahasiswa yang bekerja dalam Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap pada tahap pertama ditugaskan untuk memulihkan kepercayaan para petani terhadap Koperta. Dalam prakteknya para mahasiswa menjadi inti dari pekerjaan tersebut, dibantu oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan pembinaan Koperta (Kretosastro, 1967).

Salah seorang mahasiswa menceritakan, sesudah satu musim ia baru dapat membimbing seseorang untuk menjadi kader koperasi yang diharapkan dapat dipercaya oleh petani-petani lain memimpin pembenahan Koperta. Ketika para petani pilot proyek selesai memanen sawah mereka, sebagian petani-petani menyerahkan sedikit hasil panen mereka kepada mahasiswa yang membimbing mereka. Padi tersebut merupakan pengembalian bantuan sarana produksi yang sudah mereka terima. Disamping itu, sebagian lagi merupakan pemberian petani kepada mahasiswa sebagai tanda terima kasih, karena sudah membimbing sampai diperoleh hasil yang sangat meningkat dari biasanya. Ketika mahasiswa mengakhiri tugasnya dan akan meninggalkan desa, padi yang terkumpul itu diserahkan kepada kader koperasi yang sudah dibinanya, dengan pesan agar dikelola untuk modal Koperta. Beberapa bulan kemudian diketahui oleh mahasiswa tersebut bahwa Koperta sudah mulai mengembangkan usahanya.

Perkembangan Koperta setelah pelaksanaan Pilot Proyek MH 1963/1964 dan MK 1964 di tiga desa adalah seperti tertera dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Jumlah Anggota dan Simpanan Koperta di Tiga Desa Pilot Proyek.**

Desa	Desember 1963				Oktober 1964			
	Anggota	Simpanan (Rp)			Anggota	Simpanan (Rp)		
		Pdck	Wajib	Jumlah		Pdck	Wajib	Jumlah
Karawangkulon	141				180	3.900	34.441	38.340
Tanjungpura	280				321	4.100	32.039	36.139
Tunggakjati	519	51.900	62.360	114.260	606	60.800	26.647	87.253

Sumber : Kretosastro (1967).

Ketika Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap MH 1963/1964 tengah dilaksanakan, pada bulan Desember 1963 diselenggarakanlah Seminar Penyuluhan Pertanian atas kerjasama Jawatan Pertanian Rakyat dengan Yayasan Penelitian Pertanian Nasional. Seminar Penyuluhan Pertanian tersebut di atas dihadiri antara lain oleh wakil-wakil Fakultas Pertanian, wakil-wakil organisasi massa tani, serta pelaksana-pelaksana penyuluhan pertanian dari Jawatan Pertanian Rakyat. Seminar ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar serta mengumpulkan sumbangan pikiran yang positif ke arah cara-cara meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian pada bulan Mei 1963.

Kesimpulan seminar penyuluhan ini kemudian menjadi pedoman resmi Departemen Pertanian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di Indonesia. Dua hal yang perlu dicatat dari kesimpulan seminar tersebut adalah :

- (a) Bahwa kaum tani pada masa itu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam bidang sosial ekonomi dan kelambatan dalam bidang pendidikan, karena itu kepada mereka perlu diberikan perhatian khusus dengan memberikan iklim yang baik, sehingga timbul gairah kerja untuk meningkatkan produktivitas.
- (b) Bahwa perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam penyuluhan pertanian, meliputi tujuan, metode dan organisasinya, sehingga penyuluhan pertanian dapat memenuhi fungsinya sebagai alat revolusi.

Dua hal tersebut di atas sejalan dengan dasar pemikiran pelaksanaan Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap Karawang, yang telah direalisasikan di lapangan.

Pada musim gadu (kemarau) 1964 Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap di Karawang dilanjutkan, dengan tekanan pada upaya pembinaan koperasi untuk mengamankan hasil yang sudah meningkat berkat diterapkannya panca usaha oleh para petani.

### ***Perluasan Panca Usaha***

Setelah berpengalaman melaksanakan Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap selama dua musim, timbul pemikiran untuk memperluasnya ke daerah-daerah lain. Dengan demikian penamaan pilot proyek sudah tidak tepat lagi, dan diganti menjadi demonstrasi massal. Rencana demonstrasi massal perlu disampaikan kepada berbagai pihak.

Pada tanggal 3 - 12 September 1964 atas usaha bersama Direktorat Pertanian Rakyat dan Lembaga Koordinasi Pangabdian Masyarakat Departemen PTIP, di Jakarta diselenggarakan rapat kerja antara para Inspektur Dinas Pertanian Rakyat seluruh Indonesia dengan Dekan-dekan delapan Fakultas Pertanian. Delapan Fakultas Pertanian tersebut adalah Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Andalas di Padang, Institut Pertanian Bogor di Bogor, Universitas Padjadjaran di Bandung, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan Universitas Brawijaya di Malang. Disamping itu hadir pula Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Ketua Induk Koperasi Produksi Pertanian (Inkoperta) dan wakil P.N. Pertani. Dalam rapat itu disajikan satu-satunya prasaran berjudul Rencana Demonstrasi Massal Swa Sembada Bahan Makanan oleh Ir. Djatijanto Kretosastro, sebagai Pemimpin Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap Karawang.

Setelah melalui pembahasan oleh para peserta, rapat kerja memutuskan untuk mengerahkan tenaga mahasiswa

tingkat Sarjana dari Fakultas-fakultas Pertanian di seluruh Indonesia untuk inembantu menyelenggarakan demonstrasi massal Swa Sembada Bahan Makanan, yang selanjutnya disingkat dengan istilah Demonstrasi Massal (Demas).

### **Demonstrasi Massal (Demas)Swa Sembada Bahan Makanan (SSBM)**

#### ***Tujuan Penyelenggaraan***

Dalam rapat kerja Inspektur-inspektur Dinas Pertanian Rakyat seluruh Indonesia, 3 - 12 September 1964 dirumuskan maksud dan tujuan demonstrasi massal, sebagai berikut :

- (1) Untuk menjadikan pusat-pusat intensifikasi seluas kurang lebih 50 ha yang diusahakan dengan cara-cara bercocok tanam yang sempurna, oleh petani yang bersangkutan, dengan bimbingan secara intensif oleh koperasi setempat, yang dibantu oleh para mahasiswa bersama-sama dengan pejabat-pejabat lain, sebagai pusat-pusat demonstrasi bagi daerah-daerah sekitarnya.
- (2) Untuk menjadikan pusat intensifikasi tersebut sebagai pusat pembimbingan ke arah peningkatan produksi dan taraf hidup bagi petani sekitarnya.
- (3) Untuk menjadikan pusat intensifikasi itu sebagai suatu usaha khusus untuk membimbing Koperta, dalam rangka pendewasaan Koperta.
- (4) Untuk menjadikan pusat demonstrasi massal sebagai pusat produksi benih unggul bagi daerah sekitarnya.
- (5) Untuk menjadikan pusat intensifikasi tersebut sebagai pusat pendidikan pertanian bagi pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh tani sekitarnya (Mantri Pertanian, Pamong Tani Desa, pemimpin-pemimpin organisasi massa tani dan tokoh-tokoh tani perseorangan).

Demas SSBM yang pertama dilaksanakan pada musim hujan 1964/1965, mencakup areal sawah seluas 11.066 ha dalam 204 unit di Jawa dan luar Jawa. Dana untuk membiayai pelaksanaannya disediakan oleh Direktorat

Pertanian Rakyat Departemen Pertanian dan LKPM Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dana untuk kredit bagi petani disediakan oleh Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Pelaksanaan Demas yang pertama ini mengerahkan sekitar 400 orang mahasiswa dari delapan Fakultas-fakultas Pertanian dan Akademi Pertanian Ciawi, pejabat dan petugas Dinas Pertanian Rakyat, pengurus Koperasi Produksi Pertanian, dan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Demas MH 1964/1965 Fakultas Pertanian IPB mengirimkan satu kelas mahasiswa yang sudah selesai dengan perkuliahan pada tingkat empat. Kegiatan mereka dalam Demas dihargai sebagai pelaksanaan Praktek Umum yaitu salah satu kegiatan kurikuler.

Sebelum diberangkatkan para mahasiswa mendapat "coaching". Materi coaching meliputi latar belakang diadakannya Demas, uraian tentang pengalaman Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap, petunjuk teknis pengelolaan air irigasi di sawah, penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah, perbaikan cara bercocok tanam, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman padi, teknik-teknik pendekatan masyarakat, cara-cara penyuluhan, pembinaan Koperta, dan sebagainya.

Para mahasiswa disebarkan ke desa-desa di beberapa kabupaten Jawa Barat yang potensial untuk ditingkatkan produksi padinya dengan intensifikasi penerapan panca usaha. Setiap dua orang mahasiswa melaksanakan bimbingan dalam Demas dengan areal sekitar 50 ha.

Selesai pelaksanaan Demas, pengalaman para mahasiswa dipresentasikan dalam suatu seminar di Fakultas Pertanian IPB. Seminar tersebut juga dihadiri oleh para Dosen Pembimbing ("supervisof"), para pejabat Fakultas Pertanian IPB dan Institut Pertanian Bogor, dan undangan yang mewakili Pemerintah Daerah, LKPM Departemen PTIP,



Dirtara Departemen Pertanian, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Induk Koperasi Produksi Pertanian, dan sebagainya.

Pada tanggal 3 Juli 1965 dilaksanakan rapat kerja antara Fakultas-fakultas Pertanian pelaksana Demas SSBM 1964/1965 dengan semua Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi di Jawa, Induk Koperasi Produksi Pertanian dan KOTOE. Dalam rapat ini dibahas laporan Demas SSBM dari daerah-daerah. Rapat kerja berkesimpulan bahwa Demas 1964/1965 mencapai sukses besar (Lihat Tabel 4). Mengingat suksesnya pelaksanaan Demas SSBM 1964/1965, Demas SSBM pada musim hujan 1965/1966 direncanakan akan diperluas 15 kali lipat, sehingga mencapai 150.000 ha. Karena areal Demas yang demikian luas diperlukan wadah organisasi yang lebih kuat.

**Tabel 4. Hasil yang Dicapai oleh Demas SSBM Musim Penghujan 1964/1965**

Propinsi	Realisasi Demas		Produksi Dalam Demas Rata-rata (Ku/Ha)	Produksi Di Luar Demas Rata-rata (Ku/Ha)	Kenaikan Produksi Karena Demas	
	Unit	Ha			(Ku/Ha)	(%)
Jawa Barat (Unpad)	20	1.261	74,0	40,0	34,0	85
(IPB)	40	2.450	72,0	35,0	37,0	100
Jawa Tengah	54	2.752	74,0	32,4	41,5	120
DI Yogyakarta	10	475	80,8	50,0	30,8	61
Jawa Timur	30	1.963	77,0	31,2	45,8	148
Sumatera Utara	3	150	81,7	41,1	40,6	90
Sumatera Barat	2	100	63,8	28,8	35,0	24
Jambi	1	50	73,0	24,5	40,5	98
Sumatera Selatan	2	100	105,0	30,0	75,0	250
Kalimantan Selatan	2	100	29,0	15,0	14,0	90
Kalimantan Timur	1	45	50,0	25,0	25,0	100
Sulawesi Selatan	20	1.007	70,6	26,1	44,5	170
Bali	5	255	92,0	57,6	34,4	51
NTB	1	55	75,0	20,0	55,0	150

Sumber : Kretosastro (1967).

### ***Akhir Rintisan dan Munculnya Program Bimbingan Massal (Bimas)***

Pada tanggal 14 Juli 1965 secara resmi KOTOE mengambil alih tanggungjawab penyelenggaraan Demas SSBM. Pelaksanaan Demas SSBM di tingkat Pusat ditanggungjawab oleh Departemen Pertanian cq. Direktorat Pertanian Rakyat.

Pada tanggal 10 Agustus 1965 KOTOE mengadakan rapat kerja di Jakarta, yang dihadiri oleh Departemen-departemen Pertanian, PTIP, Transmigrasi dan Koperasi, Bank Indonesia Unit Koperasi Tani dan Nelayan, Induk Koperta, dan 22 Dekan Fakultas-fakultas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, serta IKIP seluruh Indonesia. Rapat ini membahas rencana pelaksanaan Demas 1965/1966.

Keputusan rapat antara lain (1) Nama Demonstrasi Massal (Demas) SSBM diganti menjadi Bimbingan Massal (Bimas) SSBM; (2) Koperta dinyatakan menjadi pelaksana utama Bimas SSBM; (3) Diadakan mobilisasi mahasiswa-mahasiswa untuk membantu pelaksanaan Bimas, tidak saja dari Fakultas-fakultas Pertanian tetapi juga Fakultas Ekonomi, Kehutanan, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perikanan, Akademi Koperasi, Akademi Pertanian dan Sekolah Pertanian Menengah Atas; (4) Prinsip kerja bahwa satu unit dengan areal 50 ha dibimbing oleh dua orang mahasiswa, dirubah menjadi beberapa unit masing-masing dengan areal 50 ha menjadi satu sektor, 1-2 orang mahasiswa membimbing 3-5 unit; (5) Bimas SSBM 1965/1966 akan dilaksanakan sehingga mencakup areal 150.000 ha di Jawa dan luar Jawa; (6) Bimas SSBM diadakan tidak saja untuk padi sawah, tetapi juga padi gogo, padi gogo rancah, dan padi ladang. Dengan demikian pelaksanaan Demas 1965/1966 berkembang menjadi Bimas Nasional.

## PENGEMBANGAN PROGRAM: BI

### Bimas Nasional

#### *Latar Belakang*

Program intensifikasi produksi padi dengan nama Bimas secara nasional, dilaksanakan pada musim hujan 1965/1966. Hasil yang dicapai Bimas 1965/1966 dilaporkan seperti yang tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil yang Dicapai oleh BIMAS SSBM Musim Penghujan 1965/1966"

Propinsi	Realisasi Demas		Produksi Dalam Bimas Rata-rata (Ku/Ha)	Produksi Di Luar Bimas Rata-rata (Ku/Ha)	Kenaikan Produksi Karena Bimas	
	Unit	Ha			(Ku/Ha)	(%)
Jawa Barat	713	35.500	48,42	33,21	15,21	44
Jakarta Raya	10	500	41,40	35,30	5,10	14
Jawa Tengah	1.000	71.892	65,00	30,00	35,00	110
Yogyakarta	103	5.943	61,50	40,00	21,50	54
Jawa Timur	507	25.388	57,37	35,14	22,23	63
Jambi	28	1.400	44,40	33,50	10,90	33
Sumatera Selatan	40	2.064	59,35	35,10	24,17	69
Lampung	10	500	83,44	34,45	48,99	150
Kalimantan Timur	10	500	49,00	22,00	27,00	123
Sulawesi Selatan	249	12.450	60,04	34,40	25,64	74
NTB	31	1.588	63,25	29,50	33,75	110
NTT	2	100	24,10	15,60	8,50	54

• Data tidak lengkap, karena belum semua daerah melaporkannya.

Sumber : Kretosastro, 1967.

Semula rencana Bimas MH 1965/1966 meliputi 150.000 ha. Tetapi karena antusiasme daerah maka rencana tersebut terlampaui menjadi 220.000 ha (Kretosastro, 1967). Meskipun demikian, produktivitas Bimas 1965/1966 tidaklah sebaik Demas MH 1964/1965, sebab-sebabnya antara lain (Kretosastro, 1967):

1. Kurang lancarnya penyaluran logistik pupuk, obat-obatan, alat-alat seperti **sprayer**, dan sebagainya.
2. Kurang adanya fasilitas pengangkutan.
3. Kurang lancarnya kredit untuk petani.
4. Kurang intensifnya pelaksanaannya, karena setiap unit dibimbing Koperta, sedang mahasiswa pembimbing memegang sektor yang terdiri dari 3-5 unit.
5. Karena adanya G30S/PKI, yang membuat suasana di daerah berbahaya dan menyulitkan pelaksanaan penyuluhan.
6. Perencanaan yang tergesa-gesa dan tidak sempurna bagi daerah-daerah tertentu, misalnya Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

Untuk MH 1966/1967, perencanaan program Bimas didasarkan pada konperensi kerja Bimas SSBM di Tretes Jawa Timur pada tanggal 19-21 April 1966. Dalam konperensi tersebut, Bimas 1965/1966 dinilai berhasil dalam meningkatkan produksi, walaupun banyak hambatan karena situasi politik akibat G30S/PKI maupun kesulitan biaya untuk menjamin pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut, diputuskan areal Bimas 1966/1967 meliputi 1.350.000 ha yang terdiri dari 1 juta ha areal Bimas dan sisanya merupakan proyek intensifikasi yang disebut Projek Dewi Sri Djaja di daerah sekitar Jakarta yaitu Karawang, Subang, Indramayu dan lain-lain. Untuk mendukung pelaksanaan program yang semakin meluas, terjadi peningkatan areal sekitar 150.000 ha dibanding dengan luas areal target pada masa tanam sebelumnya, dikerahkan tenaga mahasiswa dari perguruan tinggi selain Fakultas Pertanian IPB. Mahasiswa-mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian di luar IPB, IKIP, Akademi Teknik, Akademi Pertanian Ciawi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Politik yang semuanya berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa.

### ***Pengorganisasian Bimas***

Perubahan nyata pada Bimas 1966/1967 adalah dalam hal pendanaan program. Sebagai hasil konperensi di Tretes pendanaan diintegrasikan dengan pengoperasian KOLOGNAS (Komando Logistik Nasional) yang mempunyai tanggung jawab utama dalam penyediaan dan pendistribusian beras untuk pegawai negeri dan militer. Sebagian dana pemerintah (30%) untuk Kolognas yang sedianya untuk pembelian beras, digunakan untuk membiayai program Bimas 1966/1967.

Pada musim tanam 1967/1968, pengorganisasian program Bimas mengalami kesimpangsiuran atau ketidakjelasan karena begitu banyaknya jenis Bimas. Salah satu diantaranya, terdapat jenis Bimas yang dibiayai oleh propinsi dan Bimas Nasional. Disamping itu terdapat juga administrasi yang terpisah dari proyek-proyek seperti Dewi Sri Jaya dan Medan Jaya. Selain itu terdapat Bimas Gogo Rancah yang meliputi areal padi gogo pada daerah yang cukup curah hujan. Sedangkan Bimas Berdikari, pendanaannya dipikul oleh propinsi atau oleh petani itu sendiri. Di Sulawesi Selatan dikenal Bimas CIBA dimana pemerintah memperoleh kredit dalam bentuk input dari CIBA, suatu perusahaan pestisida dari Swiss. Tipe lain Bimas adalah Bimas Baru yang khusus untuk memperkenalkan varietas baru PB 5 dan PB 8. Sedangkan khusus di Sumatera dikenal KOPAN yang mengembangkan varietas padi yang hasilnya tinggi. Di beberapa tempat, program Bimas lokal dibiayai oleh pabrik gula, penggilingan padi, perusahaan seperti PT Mantrust di Jawa Barat serta perkebunan swasta dan pemerintah.

### ***Target dan Realisasi***

Areal Bimas dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi produksi per ha cenderung menurun. Walaupun demikian jumlah produksi padi Bimas masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi non Bimas (Tabel 6).

**Tabel 6.** Kenaikan Hasil Bimas Nasional dari MH 1963/1964 sampai dengan MK 1967

MH/MK	Luas (ha)		Hasil Padi ku/ha		Kenaikan Hasil	
	Rencana	Realisasi	Bimas	Non Bimas	ku/ha	%
1963/1964	100	105	66.90	43.00	23.40	54.4
1964/1965	10 000	9 985	72.95	33.92	39.03	115.0
1965/1966	150 000	172 488	52.85	27.11	25.74	94.9
1966	200 000	160 129	45.30	25.00	20.30	81.2
1966/1967	495 000	462 520	48.93	31.79	17.14	53.9
1967	15 000	10 000	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengendali Bimas, 1991.

### ***Penyaluran Sarana Produksi***

Dari sudut kepentingan petani, prosedur pengambilan kredit dari BNI Unit II (BRI) dinilai berbelit-belit dan menyita waktu dan tenaga. Hal ini disebabkan antara lain karena jarak yang terlalu jauh antara desa sasaran dengan bank, yang bertanggung jawab dalam penyaluran kredit ke desa melalui Koperta atau ketua kelompok/kontak tani. Bunga pinjaman, semula ditetapkan 3% per bulan tetapi karena dinilai terlalu berat, diturunkan menjadi 1% per bulan. Jangka waktu peminjaman ditetapkan 7 bulan dinilai sangat merugikan petani karena pada masa pembayaran harga padi dan beras paling rendah.

Penyaluran sarana produksi berupa bibit, pupuk, obat-obatan, alat penyemprot dan alat pengairan mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan belum adanya sistem pengadaan sarana produksi yang memadai, yang rencananya dilakukan oleh Koperta. Masalah kelembagaan ini timbul karena belum terbinanya jiwa berkoperasi yang sehat di antara pengurus dan anggota Koperta. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya pembinaan secara intensif dan dasar pedoman yang jelas pada koperasi-koperasi di Indonesia, termasuk Koperta. Disamping itu

beberapa pejabat daerah lebih memandang Koperta sebagai badan sosial dan belum mengakui Koperta sebagai mata rantai ekonomi di dalam penyaluran sarana produksi. Sebagai akibatnya pengembangan modal dalam koperasi tidak ada. Disamping itu karena pengurus tidak memperoleh imbalan yang layak, pengurus tidak menunaikan tugas secara baik dan pada akhirnya timbul penyelewengan.

Penyaluran bibit unggul sering mengalami hambatan, antara lain adalah kuantitas dan kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan, dan keterlambatan penyaluran sehingga petani terpaksa menanam jenis bibit lain. Kualitas pupuk dari PN Pertani dinilai kurang baik karena sudah terlalu lama disimpan dan jumlahnya diduga kurang dari ketentuan. Selain itu jarak antara gudang dengan petani relatif jauh sehingga menimbulkan keterlambatan.

### ***Pegembalian Kredit***

Masalah penunggakan kredit masih merupakan masalah utama pada masa Bimas Nasional (Tabel 7). Berbagai masalah terutama berkaitan dengan ketidاكلancaran penyaluran kredit disebabkan karena faktor kelembagaan yang kurang mendukung.

Tabel 7. Keadaan Sisa Kredit Bimas Nasional sampai dengan April 1969

Musim	Jumlah Kredit (Rp)	Sisa Kredit (Rp)	Persen Sisa dari Jumlah
1967/1968	783.815.000	215.611.000	24.4
1968	1.032.603.000	684.409.000	66.2
1968/1969	1.027.803.000	1.824.341.000	94.6
1969	53.787.000	18.512.000	34.4
Jumlah	3.898.008.000	2.742.873.000	70.6

Sumber : Badan Pengendali Bimas, 1991.

Dari sudut penyaluran kredit, berbagai kekurangan dalam pengembaliannya kredit secara tidak langsung

disebabkan oleh ketidaklancaran penyaluran sarana produksi seperti yang telah dikemukakan. Berbagai masalah tersebut, pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi tidak sebagaimana yang diharapkan, sehingga pengembalian kredit terlambat.

Ditinjau dari sudut kelembagaan, belum ada sanksi terhadap peminjarn. Disamping itu pihak petugas penagih kredit dari Koperta belum aktif melakukan penarikan angsuran. Hal lain yang diduga berhubungan dengan ketidaklancaran dalam pengembalian kredit adalah karena pengambilan kredit dilakukan secara berkelompok, sehingga rasa tanggung jawab pengambil kredit secara perseorangan cenderung tidak ada.

### ***Penyuluhan***

Pada masa program Bimas (1965-1967) kegiatan penyuluhan mengalami banyak penurunan dibandingkan dengan masa-masa Demas. Metoda penyuluhan berupa kursus-kursus, demonstrasi atau percontohan jarang sekali dilakukan. Penyebaran inovasi teknologi dilakukan dalam forum-forum rapat desa dengan penggerak para pamong desa. Dengan demikian penyebaran inovasi kepada petani tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan tetapi cenderung bersifat instruktif.

Timbulnya masalah ini tidak terlepas dari kekurangan tenaga penyuluh, karena jumlah petugas Dinas Pertanian sangat terbatas dan sangat sibuk dengan kegiatan non penyuluhan. Masalah ini menjadi semakin terasa karena pada saat perguruan tinggi non pertanian menarik kembali mahasiswanya dari lapangan pada tahun 1967.

Dengan demikian apabila dibandingkan dengan masa Demas, walaupun program Bimas semakin luas jangkauannya, tetapi beberapa prinsip penyuluhan semakin ditinggalkan karena cenderung mengejar target produksi.



## **Bimas Gotong Royong**

### ***Latar Belakang***

Sebagai akibat keterbatasan devisa negara untuk melancarkan program Bimas serta adanya berbagai kelemahan yang dijumpai pada program Bimas Nasional, pemerintah memperkenalkan atau rnengintroduksikan sistem Bimas Gotong Royong (Bimas GR) pada tahun 1968/1969. Seperti yang tersirat pada namanya, penyelenggaraan program Bimas merupakan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta asing, terutama dalam penyediaan dana.

Kerjasama dengan perusahaan asing ini berawal dari pengalaman pemerintah bekerjasama dengan CIBA dalam menyelenggarakan Bimas di Sulawesi Selatan pada tahun 1967/1968. Kerjasama ini dilanjutkan pada MH 1968/1969 yang menandai permulaan Bimas GR di tiga propinsi di Jawa. Pada musim tanam berikutnya kerjasama ini dijalin dengan perusahaan asing lainnya yaitu HOECHST, COOPA, AHT dan MITSUBISHI (Tabel 8).

Perusahaan-perusahaan ini hanya menyediakan dana berupa paket sarana produksi yang terdiri dari bibit, pupuk, insektisida dan uang sebagai biaya hidup serta upah pemberantasan hama, lampu perangkap hama (light traps) dan alat-alat penunjang untuk penyuluhan. Kredit ini sifatnya tanpa bunga.

Khusus pada Bimas GR CIBA, diterapkan pemberantasan hama dengan cara penyemprotan dengan pesawat udara yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas hama secara intensif terutama untuk daerah-daerah yang sering mendapat serangan hama sundep yang parah (misalnya di pantai utara Jawa).

Tabel 8. Target Bimas GR (1968169 - 1969170) Menurut Musim Tanam dan Perusahaan.

No	Perusahaan/ Musim Tanam	Tanggal Perjanjian	Propinsi	Target (x 1000 ha)
<b>I.</b>	<b>CIBA</b>			
1.	MH 1968169	24 Mei 1968	Jatim Jateng Jabar	100 100 100
2.	MK 1969/70	28 Nopember 1968	Jateng Jabar	30 120
3.	MK 1969/70	28 Nopember 1968	Jatim Jateng Jabar	100 100 100
4.	MH 1969/70	5 Mei 1969	Jatim Jateng Jabar	100 100 200
5.	MK 1969/70	13 September 1970	Jatim Jateng Jabar	100 100 200
	<b>Total</b>			<b>1550</b>
<b>II.</b>	<b>HOECHST</b>			
1.	MK 1969170	20 Desember 1968	Jabar	100
2.	MK 1969/70	20 Desember 1968	Jatim	100
3.	MH 1969/70	25 Juni 1969	Jatim	200
4.	MH 1969/70	7 Juli 1960	Jatim	50
5.	MH 1969170	1 Nopember 1969	Jatim	300
	<b>Total</b>			<b>750</b>
<b>III.</b>	<b>COOPA</b>			
1.	MK 1969/70	31 Desember 1968	Jabar	150
2.	MK 1969/70	19 Februari 1969	Jateng	100
3.	MH 1969/70	25 Juli 1969	Jabar	50
4.	MH 1969170	25 Oktober 1969	Jabar	47,5
5.	MH 1969170	25 Oktober 1969	Jateng	100
	<b>Total</b>			<b>447,5</b>
<b>IV.</b>	<b>AHT</b>			
1.	MK 1969	24 Nopember 1969	Sumbar	50
2.	MH 1969/70	3 Nopember 1969	Sumbar	40
	<b>Total</b>			<b>90</b>
<b>V.</b>	<b>MTSUBISHI</b>			
1.	MH 1969/70	20 Juni 1969	Jabar	200
2.	MH 1969/70	25 Juli 1969	Lampung	25
3.	MH 1969/70	28 Oktober 1969	Jabar	200
4.	MH 1969/70	28 Oktober 1969	Lampung	25
	<b>Total</b>			<b>450</b>

Sumber : Badan Pengendali Bimas, 1970.

Dengan sarana produksi tersebut di atas diharapkan produksi meningkat dari 2,8 ton/ha menjadi 4,2 ton/ha dalam bentuk padi atau 1,4 ton/ha menjadi 2,1 ton/ha dalam bentuk beras. Secara teknis, target kenaikan produksi tersebut dapat dicapai. Disamping itu pemerintah tidak dirugikan karena petani mampu mengembalikan kredit tidak kurang dari 3,1 ku beras per ha. Harga beras di pasar internasional pada saat itu adalah US \$ 13 per ku (Wardojo dan Djatijanto, 1970). Ditinjau dari kepentingan kedua pihak yaitu pemerintah dan perusahaan swasta asing, kerjasama di antara mereka menguntungkan dan dari segi kelayakan perusahaan yang terlibat tidak diragukan. CIBA mempunyai keuntungan sampingan dengan terlibatnya dalam program Bimas ini karena CIBA juga memproduksi barang-barang lain (obat-obatan) di Indonesia, sehingga jika usahanya dalam Bimas GR kurang menguntungkan dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang menguntungkan dalam kaitannya dengan kepentingan perusahaannya (Rieffel, 1969).

### ***Target dan Realisasi***

Target Bimas GR (1968169-1969170) tercantum pada Tabel 8. Menurut taksiran BULOGNAS, pengembalian kredit untuk proyek Bimas GR CIBA I (MH 1968169) hanya mencapai 40,3% (47.975,4 ton beras) dari rencana yang diperhitungkan (Hadisapoetro, 1970).

Dalam paket yang diterima petani diperhitungkan biaya untuk bimbingan (sebagai "*management fee*" Rp. 200,-/Ha) dan 2/3 biaya pemberantasan hama dengan pesawat udara. Besarnya nilai kredit yang diterima oleh petani tercantum pada Tabel 9.

Berdasarkan perhitungan di atas dan data pada Tabel 9 rata-rata subsidi yang diterima petani per hektar besarnya Rp. 7.308,-, dengan asumsi harga padi diperhitungkan seperti harga di tingkat petani saat penelitian (Kasryno, 1970). Kalau harga padi yang dibayarkan oleh petani dinilai

setaraf dengan beras impor, maka besarnya subsidi yang dibayar oleh pemerintah sekitar Rp. 4.400,-/ha. Nilai kredit yang diterima petani ini kira-kira 61% adalah nilai obat-obatan dan biaya penyemprotan dengan pesawat udara oleh CIBA. Biaya penyemprotan dengan pesawat udara oleh CIBA adalah US \$ 6/ha untuk MH 1968/1969. Biaya penyemprotan dengan pesawat udara mencapai 20% nilai kredit yang diterima petani.

Tabel 9. Nilai Perhitungan Kredit yang Diterima Petani Di Enam Desa Bimas CIBA-I Untuk Setiap Hektar.

No.	Desa	Nilai Kredit (Rp)	Nilai Kredit Riil (Rp)	Pengembalian (Rp)	Subsidi (Rp)
1.	Cidahu	12 031	6 764	5 114	6 917
2.	Mariuk	11 976	6 700	3 680	8 296
3.	Rowosari	12 137	6 878	3 920	8 247
4.	Banyutowo	12 037	6 770	6 259	5 778
5.	Gemarang	14 278	9 011	5 472	8 806
6.	Sidomulyo	14 509	9 635	9 801	5 104
	Rata-rata	12 894	7 628	5 586	7 308

Sumber : Azis. 1970

### ***Penyaluran Sarana Produksi dan Biaya Hidup***

Secara umum paket kredit Bimas Gotong Royong tidak terlalu berbeda dengan paket sebelumnya yaitu terdiri dari pupuk (Urea dan KCL), insektisida, alat-alat pemberantas hama, serta bibit unggul (PB 5 dan PB 8), biaya hidup dan upah penyemprotan (Badan Pengendali Bimas, 1970). Yang khas, dalam Bimas Gotong Royong terdapat bantuan penyemprotan insektisida dengan menggunakan pesawat udara yang dipandang sebagai inovasi baru bagi para petani. Cara ini hanya dilakukan pada Bimas Gotong Royong CIBA. Bimas Gotong Royong HOECHST, COOPA, AHT dan MITSUBISHI tidak melaksanakan penyemprotan udara. Cara ini pada waktu itu dipandang menguntungkan bagi daerah yang sering mendapat serangan hama yang berat. Namun demikian, banyak ditemui kasus keterlambatan dalam

penyemprotan insektisida di beberapa tempat. Juga dalam frekuensi penyemprotan, pada waktu itu kurang memenuhi syarat dan tidak merata. Sebagai contoh, di beberapa daerah Subang frekuensi penyemprotan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tiga kali dalam semusim. Penyemprotan tiga kali hanya dilakukan pada 26,85% dari luas areal, sedangkan 55,13% dari luas areal disemprot dua kali dan 23,97% sisanya hanya disemprot satu kali (Hadisapoetro, 1970). Sebaliknya ada areal non Bimas Gotong Royong yang disemprot.

Penyemprotan dengan pesawat udara ini menimbulkan berbagai kontroversi diantara para ahli atau pengamat. Sebagian ahli berpendapat bahwa cara penyemprotan dengan pesawat udara, sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang sering mendapat serangan hama. Di lain pihak, ditinjau dari segi efisiensi, penyemprotan dari udara ini dianggap terlalu mahal mengingat biayanya mencapai 20% dari total kredit sedangkan dengan penyemprot biasa yang bisa dilakukan oleh petani sendiri tidak membutuhkan biaya atau dengan biaya yang relatif murah. Pada waktu itu belum terpikirkan bahaya aplikasi insektisida terhadap lingkungan.

Selain itu cara ini dinilai tidak efektif karena dalam penyemprotan hama melalui udara dilakukan dengan tidak cukup mempertimbangkan persyaratan-persyaratan umur padi di areal, dan seringkali dinilai tidak efektif karena penyemprotannya dilakukan terlambat.

Efektivitas penyemprotan dengan Demicron 100 melalui udara (ultra low volume) masih disangsikan, karena terjadi ledakan hama sundep di Subang yaitu seluas 6179 ha (12% areal Bimas CIBA I di Subang) (Kasryno, 1970). Petani juga menghendaki agar mereka sendiri yang melakukan penyemprotannya.

Walaupun secara prosedur pengambilan paket kredit relatif mudah, tetapi dalam beberapa hal dijumpai masalah-

masalah berkenaan ketepatan waktu, kesesuaian jumlah dan kualitas paket kredit dengan kebutuhan petani.

Dalam hal penyaluran pupuk, obat-obatan dan bibit masih ditemui kesulitan seperti halnya dalam Bimas Nasional. Masalah tersebut berkisar pada masalah kualitas, keterlambatan dalam penyalurannya. Di beberapa daerah penyaluran pupuk mengalami keterlambatan dan bahkan sebagian kualitasnya menurun karena tidak tersedia tempat penyimpanan yang memadai atau karena bungkusnya rusak (Bimas GR COOPA).

Sedangkan dalam hal penyaluran paket kredit terdapat perbaikan dalam hal prosedur pemberian kredit, yaitu dengan cara memberikan kredit langsung tingkat desa. Sarana produksi tersebut diangkut langsung dari pelabuhan ke desa-desa oleh perusahaan swasta asing yang terlibat. Selanjutnya, paket kredit diberikan kepada petani melalui kepala desa yang menjadi pembina tingkat desa (Dewan Pelaksana Bimas Desa), sedangkan kredit uang disalurkan oleh BULOGDA langsung kepada Kepala Desa (Hadisapoetro, 1970). Dengan demikian, BRI, PN Pertani dan Koperta tidak diikutsertakan dalam Bimas Gotong Royong. Dengan perubahan kebijaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah atau mempercepat penyaluran kredit. Kemudahan lain untuk memperoleh paket kredit adalah jaminan lugas (*zakelijke borg*) tidak disediakan dan pengembaliannya tidak diminta serta tanpa bunga. Seperti halnya dalam penyaluran paket sarana produksi, penyaluran kredit uang (*cost of living*) agak terlambat baik oleh CIBA maupun COOPA.

Besarnya paket kredit Bimas Gotong Royong yang ditentukan dari pusat kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran program. Di daerah yang petaninya telah menyadari manfaat penggunaan input baru seperti di desa Cidahu, Subang dan Cianjur, dosis paket pemupukan yang diberikan tidak sesuai dengan dosis pupuk untuk daerah

tersebut, yang biasa digunakan petani. Disamping itu, jumlah sarana produksi yang diterima petani kurang dari ketentuan. Sebaliknya di beberapa tempat dijumpai pemberian pupuk yang berlebihan, sehingga kelebihannya dijual kepada petani lainnya. Hal serupa juga dilakukan oleh petani karena jenis sarana produksi yang ada dianggap tidak cocok dengan selera dan kebiasaan petani.

Pada umumnya waktu penerimaan sarana produksi pupuk, bibit dan obat-obatan terlambat. Misalnya untuk Subang pada MH 1968/69 petani mulai menanam bulan Oktober 1968 sedangkan pupuk baru datang bulan Desember 1968 (Kasryno, 1970). Sebagai akibatnya, seluas 23421 ha (47%) areal Bimas tidak menggunakan pupuk secara memadai. Di daerah lain, Cianjur, keterlambatan penyaluran sarana produksi Bimas Gotong Royong COOPA MK 1969 dan peredaran pupuk di luar program dengan harga Rp. 25,- sampai dengan Rp. 26,- per kg urea dan TSP yang relatif murah menyebabkan beberapa petani menolak ikut Bimas Gotong Royong MK 1969, sehingga sampai dengan Juni 1969 realisasi luas Bimas COOPA MK 1969 di daerah tersebut baru mencapai 46%.

Hasil penelitian Bimas GR CIBA MH 1968/69 menunjukkan bahwa tidak seluruh petani memperoleh bibit unggul tepat waktu sesuai dengan ketentuan (Kasryno, 1970). Dari enam desa contoh Bimas GR CIBA MH 1968/69 hanya petani di desa Gemarang (Kabupaten Ngawi) dan desa Sidomulyo (Kabupaten Sidoarjo) yang seluruhnya menerima bibit unggul, sedangkan di Desa Mariuk (Subang) hanya sekitar 10% menerima bibit unggul PB-5. Di Kabupaten Subang 25% petani menanam bibit unggul Nasional dan PB-5 dan sisanya menanam jenis lokal. Sekitar 50% penyaluran bibit ini terlambat diterima petani, 47% penyaluran sarana produksi pupuk terlambat untuk Kabupaten Subang dan 50% terlambat untuk Kabupaten Sidoarjo.

Obat-obatan pemberantas hama tikus yang disediakan sangat minim (20 gram/ha) dan bahkan banyak petani yang tidak menerimanya. Sebagai akibatnya, untuk daerah Subang misalnya seluas 23% areal terkena serangan hama tikus.

### ***Pengembalian Kredit***

Pengembalian kredit ditentukan seperenam dari hasil kotor panen (sebelum dikurangi bawon) menurut INPRES No. 31 tanggal 17 Oktober 1968. Dengan ketentuan seperti ini diharapkan imbang antara harga sarana produksi/pupuk dengan harga beras tidak lagi dipersoalkan tetapi cukup memberikan insentif kepada para petani. Di lain pihak resiko keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bimas dapat dipikul bersama antara pemerintah dan petani dengan cara bagi hasil (bukan berdasarkan nilai mutlak terhadap besarnya kredit).

Dalam pengembalian kredit sistem ini terdapat beberapa masalah. Masalah pertama, terdapat variasi dalam pelaksanaan prosedur pengembalian kredit di tingkat daerah. Variasi tersebut timbul karena perbedaan persepsi mengenai perhitungan total hasil yang dimaksudkan. Di beberapa daerah pengembalian kredit sebesar seperenam dari hasil ubinan, di tempat lain seperenam dari hasil kotor. Pada dasarnya pengembalian kredit dengan cara ini menyulitkan karena dibutuhkan tenaga petugas yang cukup banyak untuk mengumpulkan pengembalian kredit terutama pada saat panen yang bersamaan waktunya. Masalah kedua, beberapa daerah menentukan kebijaksanaan tersendiri dengan menetapkan jumlah minimum padi yang harus disetorkan kepada pemerintah sebagai pengembalian kredit yang juga bervariasi antar daerah. Dengan cara ini petani yang belum melunasi pengembalian sebesar jumlah minimum dianggap masih mempunyai pinjaman. Bagi petani di daerah yang menerapkan sistem ini, pengembalian kredit Bimas dipandang sangat berat terutama pada saat panen relatif rendah. Di



Sidoarjo, batas minimum pengembalian kredit 10 ku/ha untuk PB, 7,5 ku/ha untuk jenis lainnya, dan di Pemalang 9,5 ku/ha untuk semua jenis (Kasryno, 1970). Variasi pengembalian kredit tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Pengembalian Kredit Per Ha oleh Petani Enam Desa Bimas G.R. CIBA di Jawa M.H. 1968/69

No.	Desa	Produksi Rata-rata ku/ha	Pengembalian Kredit ku/ha
1.	Cidahu	27	3,6
2.	Mariuk	20	3,1
3.	Rowosari	28	3,3
4.	Banyutowo	29	5,5
5.	Gemarang	44	5,9
6.	Sidomulyo	40	8,1

Sumber : Azis, 1970.

Selain itu, dengan cara penentuan jumlah pengembalian kredit seperti ini cenderung memberi peluang petugas ataupun petani untuk berbuat tidak jujur dalam perhitungan panen untuk mengurangi jumlah pengembalian kredit yang akan dibayarkan.

Semakin menumpuknya tunggakan kredit menyebabkan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 11 Th 1969. Inpres ini berisi pernyataan penurunan paket untuk Bimas GR MH 1969/1970 dan penentuan jumlah pengembalian kredit yang didasarkan pada jumlah minimal tertentu atau dalam bentuk uang. Untuk jenis padi PB sebesar 1,125 kg padi kering lumbung atau 417 kg beras penggilingan atau Rp. 15.000,-. Sedangkan untuk padi non PB sebesar 750 kg padi kering lumbung atau 178 kg beras atau Rp. 10.000,-/ha (Wardojo, 1970).

Usaha penurunan paket dilakukan dengan penurunan dosis pupuk dan pestisida serta pembebasan beberapa pengeluaran seperti kendaraan, alat semprot, lampu

perangkap dan pengawasan lampu perangkap pada anggaran Departemen Pertanian.

### **Penyuluhan**

Pada dasarnya pelaksanaan Bimas telah berubah dari ide semula sebagai suatu kegiatan penyuluhan karena pendekatan yang digunakan cenderung instruktif dengan keterlibatan pihak petani yang relatif rendah dalam hal perencanaan atau pengambilan keputusan. Perhatian utama pelaksana program lebih kepada upaya mencapai target produksi secepatnya. Namun demikian pada kenyataannya hasilnya malah menunjukkan sebaliknya sebagai akibat tidak langsung dari kurangnya perhatian terhadap aspek penyuluhan.

Dengan demikian keikutsertaan petani dalam program Bimas ini cenderung sebagai akibat dari paksaan karena arealnya termasuk sasaran Bimas, bukan atas dasar kesukarelaan. Pendekatan yang cenderung instruktif, terbukti dari pemberian paket kredit yang sifatnya seragam untuk semua daerah tanpa memperhatikan keragaman kebutuhan di tingkat daerah. Demikian pula dalam hal pelaksanaan kegiatannya, pada Bimas CIBA I, penyemprotan untuk seluruh wilayah dilaksanakan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan pesawat udara walaupun sebenarnya petani lebih menyukai untuk melaksanakan sendiri. Selain itu, ditinjau dari segi efisiensi masih lebih menguntungkan untuk dilakukan secara individual, mengingat keragaman dalam waktu tanam dan lain-lain.

Ide dasar pelaksanaan Bimas sebagai suatu kegiatan penyuluhan dengan metoda "*olie vlek*" tidak diterapkan lagi (Wardojo, 1970). Karena areal Bimas tidak terkonsentrasi dan karena pelaksanaannya seolah-olah mengejar target produksi, maka secara keseluruhan menunjukkan kurangberhasilan dalam hal penyebaran inovasi. Hal ini nampaknya berkaitan dengan keterbatasan tenaga penyuluh dan tingkat kemam-

puan penyuluh. Selain itu, juga seperti gambaran penyuluhan di negara yang sedang berkembang, fungsi penyuluh lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan administratif dan bahkan penyuluh melakukan kegiatan di luar kegiatan penyuluhan seperti penyediaan sarana produksi, pengawasan, penagihan kredit-kredit Bimas dan lain sebagainya.

Pada Tabel 11 terlihat bahwa intensitas penyuluhan sangat rendah. Selain itu terlihat pula adanya hubungan antara tingkat pengenalan petani mengenai input baru/teknologi baru sebelum MH 1968/1969 dengan tingkat pelaksanaan panca usaha oleh petani pada MH 1968/1969.

**Tabel 11. Intensitas Penyuluhan, Pengenalan Input Baru dan Tingkat Pelaksanaan Panca Usaha di Enam Desa Contoh Bimas G.R. CIBA - I M.H.1968/1969 di Jawa**

No.	Desa	Intensitas Penyuluhan	Pengenalan Input Baru	Tingkat Pelaksanaan Panca Usaha
1.	Cidahu	11	54	56
2.	Mariuk	13	32	45
3.	Rowosari	12	63	58
4.	Banyutowo	12	52	59
5.	Gemarang	20	68	59
6.	Sidomulyo	20	74	78

**Keterangan : Intensitas penyuluhan pengenalan input : baru dan tingkat pelaksanaan Panca Usaha discore dari 0 - 100**

**Sumber : Azis, 1970.**

Keikutsertaan petani dalam program Bimas antara lain karena adanya insentif berupa subsidi pupuk dari pemerintah. Hal ini terbukti dari sikap petani terhadap Bimas cenderung "positif" dalam arti lebih menyukai ikut Bimas daripada tanpa ikut Bimas dengan harga pupuk di pasar Rp. 24,-/kg (Tabel 12).

Penolakan masyarakat terhadap Bimas adalah karena alasan ekonomi yaitu kesangsian akan mendapatkan

keuntungan yang layak untuk mereka. Dari hasil survey Bimas SAE dari seluruh sampel di Jawa, petani yang menolak Bimas bila B/C rasionya lebih kecil dari 1,5 dan menerima Bimas CIBA I adalah bila B/C rasionya lebih besar dari 1,5 (Azis, 1970).

**Tabel 12. Pilihan Petani antara Dua Alternatif : Bimas Umum Pupuk Tidak Dihargakan 1 kg Urea 1 kg Beras di Desa Musim Garap dengan Bimas CIBA (Persentase Petani Contoh).**

Alternatif	BIMAS NON PB				BIMAS PB			
	Jabar	Jateng	Jatim	Jawa	Jabar	Jateng	Jatim	Jawa
1. Bimas Umum (1 kg Urea 1 kg beras)	-	100	-	35	4	88	-	32
2. Bimas CIBA	92	-	92	67	88	12	100	67
3. Tidak berpendapat	8	-	8	2	8	-	-	1
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Azis, 1970.

Pada tahun 1969, ditengah-tengah masa pelaksanaan Bimas Gotong Royong dikeluarkan Keppres RI Nomor 95 Tahun 1969. Keppres ini mengatur pembentukan Badan Pengendali Bimas di tingkat Departemen Pertanian, Badan Pembina Bimas di tingkat Propinsi/Dati I, Badan Pelaksana Bimas di Daerah Kabupaten/Dati II, Badan Pembina Bimas Kecamatan di tingkat kecamatan dan Badan Pembina Desa di tingkat desa. Dalam periode ini Bimas diartikan sebagai suatu kegiatan penyuluhan pertanian secara massal, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi dalam tahap pertama khusus padi/beras, yang sekaligus meningkatkan pula kesejahteraan petani dan masyarakat.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan Bimas Gotong Royong banyak ditemukan kekurangan-kekurangan, antara lain: (1) pengaturan sarana produksi yang sering tidak tepat

jumlah, kualitas dan waktunya, (2) penyuluhan yang kurang intensif, dan (3) pengembalian kredit dengan tingkat bunga yang rendah (18 persen). Namun dibalik kekurangan-kekurangan tersebut, terdapat tiga manfaat Bimas Gotong Royong antara lain :

- (1) Bimas Gotong Royong telah membuktikan bahwa melalui pengusaha-pengusaha swasta nasional, pupuk dan sarana produksi lainnya dapat dikirimkan sampai ke desa bahkan sampai ke sawah petani;
- (2) Cara pemberantasan hama pada tanaman padi melalui penyemprotan dari udara akhirnya terbukti manjur terutama terhadap sundep dan beluk yang merajalela di daerah-daerah sarang hama, yang sebelumnya belum pernah dikuasai;
- (3) Petani non peserta Bimas Gotong Royong, dengan jalan memanfaatkan pupuk murah berasal dari "kebocoran-kebocoran" Bimas Gotong Royong telah meyakini manfaat pupuk dan pestisida dalam usaha peningkatan produksi padi.

Setelah terlaksana selama dua tahun (empat musim tanam), yaitu tahun 1969/1970 dan 1970/1971, masing-masing dengan areal 791.000 ha dan 969.000 ha, pada tahun 1970 Bimas Gotong Royong dihentikan. Sebagai gantinya mulai 1971/1972 dilaksanakan Bimas Nasional yang Disempurnakan.

## **Bimas Nasional yang Disempurnakan**

### ***Pilot Proyek***

Ketika di berbagai tempat di Indonesia masih dilaksanakan Bimas Gotong Royong, telah disadari bahwa Bimas mengandung berbagai kelemahan, dan perlu disempurnakan. Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro, seorang Guru Besar dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta merintis penyempurnaan Bimas dengan

melaksanakan pilot proyek di **empat** kabupaten di daerah Istimewa **Yogyakarta**.

Pilot proyek **tersebut** memusatkan perhatiannya pada penyempurnaan kegiatan-kegiatan penunjang pertanian dengan prinsip-prinsip **sebagai** berikut :

- a. pelaksanaan dan kegiatan percobaan, penyuluhan, penyaluran sarana produksi, kredit dan pemasaran harus dijalankan di pedesaan serta tidak diserahkan kepada sesuatu **lembaga/badan**, tetapi diserahkan kepada beberapa **badan** yang dianggap telah mempunyai pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. kegiatan yang bersifat non-ekonomi seperti percobaan dan penyuluhan digerakkan oleh pemerintah, sedangkan kegiatan yang bersifat ekonomi seperti kredit, penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil dapat diselenggarakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau koperasi;
- c. mengusahakan agar petani dapat memanfaatkan jasa-jasa ekonomi yang disediakan berbagai lembaga secara langsung, **namun** lembaga yang ditugaskan memberi jasa tetap dapat memperoleh keuntungan, minimal tidak mengalami kerugian;
- d. membina koperasi agar **mampu** mengambil bagian secara nyata dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan di pedesaan.

Dalam pilot proyek ini diperkenalkan pengorganisasian kegiatan dalam suatu kesatuan wilayah yang disebut "unit desa", merupakan gabungan 6-7 desa dengan total areal sekitar 1.000 ha. Dalam kesatuan wilayah tersebut dibentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) untuk menjalankan fungsi ekonomi, terutama pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta penyediaan sarana produksi.

Perbaikan-perbaikan pelaksanaan Bimas yang **disaran-**kan oleh pilot proyek ini **adalah** :

- a. intensifikasi penyuluhan pertanian dilakukan dengan menambah **jumlah** tenaga penyuluh pertanian dan menempatkan di tingkat kecamatan, tiap tenaga penyuluh **bertanggungjawab** terhadap areal wilayah unit desa (600-1.000 ha);
- b. perbaikan pelayanan kredit BRI, dengan membentuk BRI Unit Desa yang memberikan pelayanan kredit langsung kepada petani perorangan;
- c. perbaikan pelayanan sarana produksi melalui **kios-kios** sarana produksi yang dikembangkan dalam wilayah unit desa;
- d. perbaikan dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil dengan memanfaatkan unit-unit pengolahan hasil, baik yang sudah ada maupun menambah **baru**.

### ***Pelaksanaan***

Mengingat kelemahan-kelemahan Bimas **Gotong Royong** serta adanya perbaikan kondisi perekonomian nasional, khususnya persediaan dana pemerintah, mulai **musim tanam** 1970/1971 Pemerintah menghentikan Bimas **Gotong Royong** dan menggantinya dengan Bimas Nasional yang Disempurnakan. Bimas Nasional yang Disempurnakan dilaksanakan dengan menerapkan saran-saran pilot proyek **Yogyakarta**.

Pembinaan dalam Bimas Nasional yang Disempurnakan diperbaiki. Dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 400/Kpts/Um/8/1970 dibentuk **Badan Koordinasi Penerangan Bimas** di tingkat **Pusat**, Tim Pembina Penerangan Bimas di tingkat Propinsi dan Tim Pelaksana Bimas di tingkat Kabupaten. Tim ini merupakan "**task force**" dan Pelaksana Harian Bimas yang mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam menetapkan kebijaksanaan penerangan,

merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan penerangan Bimas dan memberikan bimbingan dan petunjuk di bidang penerangan. Untuk lebih melancarkan pelaksanaan Bimas di tingkat yang lebih bawah, maka dibentuklah Badan Pelaksana Bimas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/Org/6/1971. Selain itu ditetapkan pula Panitia Urusan Pupuk dan Komisi Pestisida. Panitia Urusan Pupuk dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1972, sedangkan Komisi Pestisida dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/OP/4/1970.

Dalam periode ini Bimas merupakan usaha bimbingan bersama dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah, baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Pertanian, ke arah swadaya masyarakat tani sendiri dengan jalan Panca Usaha, pembinaan hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran serta pembangunan masyarakat desa.

Sasaran Bimas adalah petani/kelompoktani, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Sebagai objek petani merupakan titik sasaran pelayanan, sedangkan sebagai subjek petani merupakan pemimpin sekaligus sebagai pelaksana utama dalam usahatani. Dengan Bimas, perkembangan usahatani diarahkan pada : (a) praktek berusahatani yang lebih baik (*better farming*), (b) berusahatani yang lebih menguntungkan (*better business*), (c) berkehidupan yang lebih layak (*better living*) dan tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (*better community*).

### ***Periode Pemantapan (Intensifikasi Khusus)***

Berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 1979, struktur Badan Pengendali Bimas mengalami perubahan. Istilah Badan Pengendali Bimas diubah menjadi Badan Koordinasi Bimas. Struktur Badan Koordinasi Bimas terdiri dari Badan



Koordinasi Bimas dan Satuan Pengendali Bimas. Di tingkat daerah strukturnya **sama** dengan struktur sebelumnya tetapi **istilah Badan** diubah menjadi Satuan. Ketua Satuan Pengendali Bimas dipegang oleh Menteri Muda Urusan Produksi **Pangan** dibantu Sekretaris Satuan Pengendali Bimas yang dirangkap Direktur Jenderal Pertanian **Tanaman Pangan** dan **Wakil** Sekretaris Satuan Pengendali Bimas dirangkap oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan Produksi **Pangan**.

Sekretariat Satuan Pengendali Bimas terdiri **dari** 4 Biro, **yaitu** :

- (a) Kepala Biro Administrasi,
- (b) Kepala Biro Perencanaan dan Program,
- (c) Kepala Biro Pengendalian Operasi Lapangan, dan
- (d) Kepala Biro Pengendalian Perkreditan dan Saprodi.

Pada periode ini sistem Bimas **menjalani** pemantapan. **Sebagai** tindak lanjut Keputusan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 2 Mei 1979 ditetapkan bahwa akan dilaksanakan perlombaan **Intensifikasi Khusus** sejak MT 1979. **Lomba** intensifikasi khusus pertama **kali** dimenangkan oleh kelompok tani Rajasa dari Kabupaten **Tabanan**, Bali.

Intensifikasi Khusus (**Insus**) adalah pelaksanaan Program Bimas oleh petani sehamparan secara berkelompok **guna** memanfaatkan potensi lahan **sawah** secara optimal. Kegiatan kelompok tani secara keseluruhan **diprakarsai** oleh kelompok inti dalam merumuskan rencana kerja, mencari dan menyebarkan informasi, memimpin dan mengawasi **kegiatan** anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama dengan **pihak** luar kelompok serta menghadiri forum-forum komunikasi dengan para pemuka masyarakat di desanya.

Untuk mensukseskan program ini ditetapkan penyaluran pupuk melalui KUD. Dalam rangka pembinaan KUD, pemerintah memberi kesempatan kepada KUD untuk membeli pupuk langsung dari Lini III dengan jumlah terbatas ( $\pm$  10 ton)

secara tunai. Pengamanan pertanaman diupayakan dengan pengadaan kredit sprayer. Permasalahan yang dihadapi antara lain masalah tunggakan kredit Bimas. Dalam rapat tanggal 6 Nopember 1979 di Jakarta, disarankan kepada Sidang Ekuin/Kabinet Terbatas agar tunggakan kredit Bimas padi dan palawija yang jumlahnya lebih kurang Rp. 14 milyar (MT1970 - MF 1971) dibekukan/ditanggihkan penagihannya. Saran ini diberikan mengingat kelalaian tersebut bukan sepenuhnya kesalahan petani.

Pada periode pelaksanaan pembangunan pertanian Repelita III, ditetapkan kebijaksanaan untuk mensukseskan berbagai upaya sebagai terobosan dalam menyediakan produksi beras di Indonesia. Terobosan-terobosan tersebut ialah :

- a. Kepada kelompok tani peserta Insus yang menjual hasilnya kepada Bulog diberikan premi Rp. 3/kg gabah kering giling.
- b. Dipersiapkan dan dilaksanakan Operasi Khusus (Opsus) pertama, yaitu : Opsus Tekad Makmur Nusa Tenggara Barat pada MF 1980/1981 seluas 26.200 ha, dengan dukungan :
  - (1) paket kredit ditambah dan disalurkan lebih awal satu bulan (September);
  - (2) penyaluran sarana produksi harus "5 tepat";
  - (3) bibit yang digunakan ialah PB 36;
  - (4) penyaluran dan pembinaan harus ditingkatkan (tidak bersifat rutin).
- c. Keberhasilan Opsus Tekad Makmur NTB diteruskan dan diikuti oleh Opsus Nusa Makmur NTT dan Lappo Ase Sulawesi Selatan pada MF 1981/1982.
- d. Melaksanakan inventarisasi dan penumbuhan kelompok tani secara bertahap, dimulai dengan kelompok tani peserta Insus. Pengakuan terhadap keberadaan kelompok tani dikembangkan. Pada permulaan Pelita III, dikembangkan stratifikasi kelompok tani berdasarkan 10

jurus kemampuan kelompok, sehingga kelompok-tani dibagi dalam 4 kelas yaitu kelompok Pemula, kelompok Lanjut, kelompok Madya dan kelompok Utama.

- e. Areal Insus diperluas, Opsus dikembangkan untuk daerah-daerah lain, pascapanen ditangani lebih baik, Inpres 10 Tahun 1981 (usaha penagihan tunggakan kredit) terus digalakkan.

Usaha intensifikasi terus ditingkatkan dengan cara peningkatan mutu Insus, peningkatan Intensifikasi Umum (Inmum) menjadi Insus dan mengintensifkan daerah-daerah non-intensifikasi pada lahan sawah yang terjamin airnya. Sawah tadah hujan, pasang surut dan lebak, bila memungkinkan dapat menjadi Insus.

Dalam rapat koordinasi Satuan Pengendali Bimas di Jakarta tanggal 10 Desember 1981 diputuskan antara lain persiapan Opsus MT 1982, menetapkan lokasi pembangunan Gudang Lantai Jemur-Kios (GLK) untuk KUD sebanyak 1.263 buah oleh Ditjen Koperasi dan Ditjen Moneter Departemen Keuangan disinkronkan dengan program Bimas. Disamping itu juga ditetapkan keseragaman harga pupuk KCl untuk sub sektor pangan dan non pangan. Pada periode ini dilaksanakan pengembangan intensifikasi komoditas bawang merah, bawang putih dan lombok.

Diinformasikan bahwa di lapangan ditemukan beberapa masalah yang mendesak untuk diatasi, antara lain :

- a. Masalah penanganan pascapanen MT 1981/1982 yang mencakup penyusutan, harga dasar dan penyediaan dana premi untuk peserta Insus yang menjual gabahnya ke DOLOG/BULOG lewat KUD dan masalah banyaknya butir hijau/kapur.
- b. Masalah kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, yaitu propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan Kalimantan Barat.

### ***Perluasan Sistem Bimas pada Berbagai Komoditas***

Penerapan pola Bimas pada komoditas-komoditas non-padi dilaksanakan sejak Pelita I. Intensifikasi sayuran mulai tahun 1974/1975, intensifikasi tebu rakyat (TRI) dilaksanakan sejak tahun 1975 dan intensifikasi palawija sejak tahun 1982/1983.

Untuk lebih mensukseskan peningkatan produksi pertanian dan meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara beberapa bidang kegiatan, melalui Keppres RI Nomor 62 Tahun 1983 organisasi dan tatakerja Satuan Pengendali Bimas disempurnakan dan dikembangkan.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 62 Tahun 1983, diadakan Rapat Pleno Koordinasi Badan Pengendali Bimas pada tanggal 13 Januari 1984. Pada rapat ini dijelaskan dengan tegas bahwa Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi non struktural yang menyelenggarakan Bimas dipimpin oleh Menteri Pertanian sebagai Ketua. Adapun pada setiap bidang dibantu oleh seorang ketua bidang yaitu : Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan selaku Ketua Bidang Tanaman Pangan, Menteri Muda Urusan Produksi Tanaman Keras selaku Ketua Bidang Perkebunan, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan selaku Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan. Dari hasil rapat pleno ini ditegaskan pula bahwa komoditas yang dikoordinasikan oleh Badan Pengendali Bimas dalam program intensifikasi bukan hanya padi saja, tetapi juga mencakup palawija, hortikultura, tebu, kapas, udang, bandeng, ayam bukan ras dan ternak kerja. Adapun penerapan intensifikasi pada komoditas-komoditas lain akan dipertimbangkan secara hati-hati dan bertahap.

Dari hasil pertemuan dengan Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian dinyatakan bahwa sistem Bimas akan menghilangkan pengkotakan dan fanatik komoditi yang sempit. Administrasi PPL/PPS seyogyanya dipusatkan di

Sekretariat Pengendali Bimas, karena sifatnya operasional penyuluhan untuk mencapai sesuatu sasaran. Dengan penyempurnaan Keppres 6 Tahun **1979** berarti Sekretaris Badan Pengendali Bimas tidak lagi dirangkap oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, sebab mencakup berbagai komoditas non tanaman pangan.

Sesuai dengan Keppres Nomor 62 Tahun **1983** pengertian Bimas adalah merupakan perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai dengan penyediaan paket sarana produksi pertanian dan kredit, untuk peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi tanaman padi, palawija, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan keluarganya.

Banyak perkembangan yang terjadi pada periode Keppres 62 Tahun **1983** ini, antara lain :

- a. Kredit massal pola Bimas dihentikan mulai Mei **1985**. Bagi petani yang memerlukan kredit usahatani (KUT) untuk tanaman padi dan palawija disalurkan/disediakan lewat KUD, sedangkan bagi petani yang tidak memperoleh fasilitas KUT, disediakan fasilitas kredit seperti Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), KIK/KMKP dan KMK melalui BRI Unit Desa.
- b. Gerakan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Intensifikasi Tambak (Intam), Intensifikasi Ternak Kerja (Intek), Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab), dan Intensifikasi Mina Padi.
- c. Gerakan terhadap pencapaian sasaran areal Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) dan pengembangan areal TRI di beberapa Propinsi.
- d. Meningkatkan hubungan melembaga antara kelompok tani dan KUD. Untuk memudahkan pembinaan maka wilayah kerja KUD merupakan perkalian bulat dari WKPP, anggota kelompok tani menjadi anggota KUD, dan salah satu KTNA menjadi pengurus KUD.

- e. Penyempurnaan di bidang penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyuluhan pertanian, perkreditan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian terus dilaksanakan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dengan pola Bimbingan Massal, yaitu memasyarakatkan teknologi baru, sehingga pada tahun 1979 berhasil menembus gejala "*levelling off*" dengan pola Insusnya. Sejak tahun 1984 pola Bimas telah mampu mengantarkan negara Indonesia sebagai negara yang berswasembada pangan/beras. Keberhasilan ini tidak terlepas dari manajemen pola Bimas yang terarah.

## **Program Supra Insus**

### ***Latar Belakang***

Tumbuhnya kemampuan kelompoktani merupakan proses belajar melalui interaksi sosial untuk menyelenggarakan usahatani bersama (Insus) yang secara konseptual sebetulnya memberikan bentuk operasional yang konkrit dari pengertian Bimas. Dengan Insus, apa yang diinginkan predikat massal menampilkan dirinya sebagai instrumen penyelenggara program pembangunan pertanian yang berencana. Melalui Insus sebagai inovasi yang dikembangkan untuk menyempurnakan mekanisme pembinaan program intensifikasi yang ditunjang oleh struktur pedesaan maju, maka mekanisme pasar dan pembinaan sosial ekonomi dapat menggairahkan partisipasi petani dalam program intensifikasi.

Pada tahun 1986 peranan Insus terhadap peningkatan produksi beras nasional mulai menunjukkan gejala "*levelling off*", yaitu ketika areal Insus di atas 50 % dari areal panen. Hal ini merupakan ancaman bagi kelestarian swasembada pangan yang dicapai pada tahun 1984 dan harus ditangani secara serius. Kejadian itu hampir sama dengan kejadian pada tahun 1975-1977.

Setelah dikaji secara menyeluruh dengan memperhitungkan potensi dan kendala yang secara operasional dapat dimanfaatkan dan dikendalikan adalah meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan mutu intensifikasi, sambil terus berusaha untuk meningkatkan areal panen di luar pulau Jawa. Adapun peningkatan mutu intensifikasi yang diperhitungkan akan mampu meningkatkan produktivitas lahan saat itu ialah :

- a. peningkatan areal yang menggunakan benih bermutu serta meningkatkan populasi tanaman;
- b. perluasan areal usahatani yang menerapkan pemupukan berimbang dengan dosis dan waktu yang tepat;
- c. peningkatan areal yang menggunakan zat pengatur tumbuh dan pupuk pelengkap cair;
- d. pemberantasan hama/penyakit dengan jalan mengamalkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan
- e. peningkatan mutu pengolahan tanah dengan sekaligus mempercepat pengolahan tanah untuk menjamin terlaksananya pola dan jadwal tanam yang ditetapkan.

Untuk mempertinggi peluang keberhasilan diusahakan agar peningkatan mutu intensifikasi itu terkonsentrasi pada wilayah dengan potensi sumber daya yang terbaik, sehingga masukan perangkat lunak (manajemen, kepemimpinan dan keahlian) dapat dipusatkan untuk beroperasi dan berinovasi di wilayah terbatas dan tidak terpecah. Dalam menangani kondisi dengan wilayah yang lebih luas yang di dalamnya terdapat kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus, maka diperlukan rekayasa sosial dan rekayasa ekonomi baru yang disebut **Supra Insus**.

### **Pelaksanaan**

Ditinjau dari sudut struktur pengelolaan, Supra Insus menampilkan satu pusat pengambilan keputusan manajemen

dalam Supra Insus menjadi empat tingkatan, yaitu individu, kelompok, kelompok KINA tingkat Wilayah Kerja Penyuluhan (WKPP) dan kelompok KINA tingkat Unit Himpunan Supra Insus (UHSI). Hal ini berarti bahwa keputusan tiap petani dalam mengelola usahatannya harus berorientasi dan melaksanakan keputusan tingkat kelompok, tingkat kelompok KINA WKPP dan kelompok KINA tingkat UHSI.

Supra Insus adalah rekayasa sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok petani pelaksana Insus pada satu WKPP, yang didukung dengan kerjasama antar KINA dalam satu WKPP, antar KINA dalam satu WKPP dan sekurang-kurangnya 2 WKPP dengan luas areal usahatani sekitar 15 - 35.000 ha. Penyempurnaan terhadap luas hamparan Unit Hamparan Supra Insus terus dikembangkan mengingat dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan. Pada saat sekarang luas Unit Hamparan Supra Insus dapat dilaksanakan pada areal minimal 3000 ha, asal syarat-syarat teknis dipenuhi.

Dengan pola Supra Insus, isu ancaman terhadap pelestarian swasembada pangan sebagai akibat kenaikan produksi pada tiga tahun terakhir yang semakin mengecil dapat dijawab. Pada tahap pertama, yaitu MT 1987, Opsus Jatiluhur Pantai Utara (Opsus Jalur Pantura) meliputi luas 270.000 ha yang tersebar di lima kabupaten (Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu) Propinsi Jawa Barat, ditambah dengan Panduan Supra Insus di tiga kabupaten, yaitu Pekalongan (Jawa Tengah), Jombang (Jawa Timur) dan Sidrap (Sulawesi Selatan).

Pada pelaksanaan Supra Insus yang dimulai MT 1987 diterapkan 10 unsur teknologi yang disebut 10 **Unsur Teknologi Supra Insus** yaitu : (1) Pengaturan pola tanam, (2) Pengolahan Tanah yang sempurna, (3) Penggunaan benih yang bersertifikat/berlabel biru, (4) Pergiliran varietas, (5)



Penerapan jarak tanam yang sesuai dengan buku teknis, (6) Pemupukan berimbang, (7)Tata guna air di tingkat usahatani, (8)Penggunaan pupuk pelengkap cair, (9)Pemakaian pestisida secara bijaksana dan pengendalian jasad pengganggu secara terpadu dan (10)Penanganan panen dan pascapanen.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tentang keberhasilan petani dan kemajuan teknologi baru yang dapat menghasilkan varietas-varietas unggul baru berpotensi produksi sangat tinggi serta diterapkannya kerjasama dalam dan antar kelompok tani, maka peluang peningkatan produksi pangan masih terbuka lebar.

Bertitik tolak dari gambaran potensi-potensi tersebut di atas, maka tantangan bagi program ini, perlu ditanggapi dengan suatu sistem pengelolaan usahatani yang menganut prinsip teknologi hemat lahan, konservasi dan berwawasan lingkungan serta kepentingan nasional. **Supra Insus** merupakan wujud nyata dari teknologi hemat lahan dan produktivitas tinggi. Dengan demikian perlu lebih dimantapkan lagi. Pemilihan pola **tanam/pola** usahatani perlu mendapat perhatian yang **serius** pula. Tindakan konservasi lahan **harus** melengkapi tindakan teknologi yang lain.



## PENUTUP

Perguruan Tinggi baik dalam konteks regional maupun nasional mempunyai peranan langsung dan tidak langsung dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Peran-peran tersebut secara nyata telah ditampilkan sebaik-baiknya dalam perwujudan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Sejarah telah menunjukkan bahwa rintisan Program Bimas merupakan salah satu wujud nyata peranan langsung perguruan tinggi dalam pembangunan di Indonesia.

Program Bimas berkembang dari suatu gagasan yang dicetuskan dari perguruan tinggi sebagai jawaban terhadap tantangan masalah pangan nasional. Dalam perjalanannya dari suatu gagasan, rintisan, pilot proyek, demonstrasi massal hingga menjadi program nasional yang merupakan strategi peningkatan produksi pertanian, melalui proses yang panjang dan memerlukan partisipasi aktif serta dukungan dari berbagai pihak. Beberapa hal dapat dicatat dan dapat dijadikan pengetahuan, khususnya bagi sivitas akademika perguruan tinggi antara lain adalah :

- 1) Gagasan dan rintisan program Bimas merupakan terobosan baru dalam modernisasi teknologi, penyuluhan dan pengelolaan program peningkatan produksi padi sebagai usaha perbaikan dari program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- 2) Metode yang digunakan dalam modernisasi peningkatan produksi padi melalui tindak langsung (action) penerapan Panca Usaha dari hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil-hasil penelitian.
- 3) Gagasan Bimas dapat diterima dan dijadikan sebagai program nasional setelah melalui suatu proses dalam pengujian teknologi dan pengambilan keputusan yang

cukup panjang, dimulai dari pilot proyek dalam skala kecil, demonstrasi massal dan pengembangannya sesuai dengan masalah-masalah yang timbul kemudian.

- 4) Keberhasilan ini tidak lain karena adanya "political will" dari Pemerintah khususnya Departemen Pertanian terhadap gagasan yang dicetuskan oleh perguruan tinggi dan dukungan berbagai pihak baik instansi maupun perorangan yang terkait dengan masalah pangan serta dedikasi dari para pelaksana.

Menghadapi masalah-masalah pembangunan dewasa ini dan masa yang akan datang, sesuai dengan peranannya, perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusannya yang mampu menerapkan IPTEK yang telah dimilikinya dalam bentuk karya-karyanya yang monumental dan secara langsung dapat memecahkan masalah pembangunan pertanian seperti halnya program Bimas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D.A. 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Pertanian Berencana. Kasus Usahatani Berkelompok Sehamparan dalam Intensifikasi Khusus (Insus) Padi - Suatu Survai di Jawa Barat. Disertasi Universitas Pajajaran.
- Azis, M. Amin. 1970. Petani dan Bimas Gotong Royong : Kasus CIBA I, MH 1968/1969. Agro Ekonomika Tahun I No. 1 Januari 1970. Jakarta.
- Badan Pengendali Bimas. 1970. Agreements of Bimas Gotong Royong 1968/1969 - 1969/1970. Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian - Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1991. Sejarah Perkembangan Bimas, Dinamika Proses Gerakan Partisipasi Masyarakat Tani dalam Program Bimas Menuju Tahap Tinggal Landas. Sekretariat Badan Pengendali Bimas, Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1960. Rentjana 3 Tahun Produksi Beras.
- Hadisapoetro, Sudarsono. 1970. Bimas Gotong Royong dan Pembangunan Pertanian. Agro Ekonomika Tahun I No. 1 Januari 1970 Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1971. Bimbingan Massal dalam Usaha Peningkatan Produksi Padi Melalui Intensifikasi. Indonesia Commodity Review, I/3, Mei - Juni 1971.
- Kasryno, Faisal. 1970. Petani dan Bimas Gotong Royong. Agro Ekonomika Tahun I No. 1 Januari 1970 Jakarta.
- Kretosastro, Djatijanto. 1967. Bimas SSBM : Bimbingan Massal Swa Sembada Bahan Makanan. Sekretariat Badan Pengendali Bimas, Jakarta.

Paerels, J.H. 1929. Dua **Puluh** Tahun **Campur Tangan** Pemerintah **dalam** Pertanian Rakyat (1908-1928). Direktorat Pertanian Rakyat, Departemen Pertanian, Jakarta.

Rieffel, A. 1969. The Birnas Program for Self-sufficiency in Rice Production. Indonesia. Modern Indonesia Project, Cornell University. Ithaca. No. 8, October 1969.

Wardojo dan Djatijanto. 1970. Pembahasan **Atas Prasaran** : **Bimas Gotong Royong** dan **Pembangunan Pertanian**. Agro Ekonomika Tahun I No. 1 **Januari** 1970 Jakarta.



